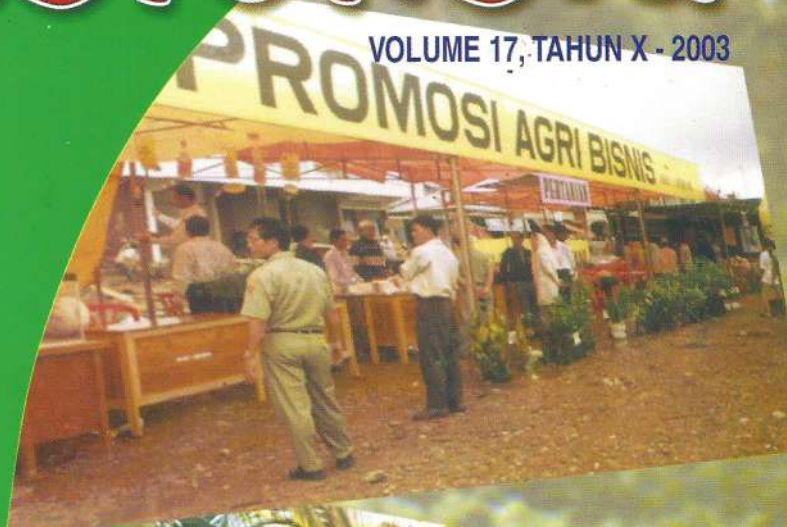


ISSN NO. : 0853-5922

ekstensia

VOLUME 17, TAHUN X - 2003



REVITALISASI PENYULUHAN PERTANIAN

Putri

ekstensia

MAJALAH PENYULUH PERTANIAN

- I. Pelindung : Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian
- II. Penanggung jawab : Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian
- III. Pengarah Materi : 1. Ir. M. Ridha Ismail;
2. Ir. Diana Prasastyawati M. Si;
- IV. Tim Penyunting :
- Ketua : Ir. Farida Salim, M.Ed;
- Sekretaris : Ir. Andi Sumarga;
- Anggota : 1. Ir. Zahir Zachri, MA;
2. Ir. Subagio;
3. Ir. Abdulah Syarief;
4. Ir. Hotman;
5. Ir. Sumardi
6. Ir. Bambang Gatut, N. M.Si.;
7. Ir. Syarifuddin Hattab;
8. Ir. Ranny Mutiara;
9. Ir. Erwin Zulkarnaen;
- V. Administrasi : 1. Havid Mahyudin B.Sc.;
2. Joko Samiyono, S.P.
- VI. Keuangan : Darwawis, S.Sos
- VII. Distribusi : 1. Ir. Puji Prabowo.
2. Dodo Handoko

Salam dari redaksi

Di era reformasi sekarang ini, seyogyanya penyelenggaraan penyuluhan pertanian belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu, dan tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Menghadapi tantangan yang lebih besar dimasa mendatang, penyelenggaraan penyuluhan pertanian bersama petani dan masyarakat pertanian, sudah saatnya mereposisi diri untuk bersama-sama meluruskan kembali kesisteman penyuluhan pertanian sesuai dengan kaidah-kaidah penyuluhan pertanian yang tepat dan benar tanpa mengabaikan arah, kebijakan dan misi pembangunan pertanian nasional.

Karena itulah pada Volume 17 ini, ekstensia menampilkan judul utama atau tema "Revitalisasi Penyuluhan Pertanian" dalam upaya mereposisi diri. Revitalisasi penyuluhan pertanian pada dasarnya merupakan upaya mendudukkan, memerankan, dan memfungsikan serta menata kembali penyuluhan pertanian agar diselenggarakan lebih produktif, efektif, dan efisien.

Disajikan pada tulisan ini dua upaya pokok dalam revitalisasi penyuluhan yaitu: 1) Pengembangan penyuluhan pertanian, yang terdiri dari pengembangan sistem dan kelembagaan, ketenagaan, program dan penyelenggaraan. Pada ekstensia 17 ini disajikan tanpa pengembangan kelembagaan penyuluhan, karena sudah disajikan pada ekstensia 16; 2). Pengembangan program aksi penyuluhan pertanian untuk membangun sistem dan usaha agribisnis.

Pada bulan Oktober tahun 2003 ini keluarga Badan Pengembangan SDM Pertanian kehilangan dua orang tokoh yang sangat berjasa dalam mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia pertanian, yaitu Bapak H. Oyon Tahyan dan Bapak H. Hamid. Bapak H. Oyon Tahyan merupakan tokoh nasional dalam memimpin petani sejak beliau muda, banyak sekali jasa beliau dalam pengembangan penyuluhan pertanian. Sedangkan Bapak H. Hamid kita kenal sebagai seorang pengelola P4S yang banyak juga jasanya terhadap peningkatan kemampuan petani. Karena itu kami sajikan untuk mengenang jasanya, sosok beliau, dan juga tulisan Bapak H. Oyon Tahyan yang sudah disajikan pada ekstensia vol. 6 tahun 1998.

Semoga informasi-informasi yang disajikan dalam rubrik-rubrik pada ekstensia ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, terutama para penyuluh pertanian, para petani, dan para penentu kebijakan. Diharapkan informasi ini pada akhirnya dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani sehingga pendapatan mereka meningkat. Amin.

Selamat membaca

	GAPURA	
	Salam Dari Redaksi	1
	DAFTAR ISI	2
	PROGRAM	
	Pengembangan Penyuluhan Pertanian dalam Upaya Revitalisasi Penyuluhan Pertanian	3
	Program Aksi Penyuluhan Pertanian dalam Upaya Mewujudkan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian	8
	SOSOK	
	In-Memoriam - H. Oyon Tahyan Petani Pemimpin; Pemimpin Petani	10
	In-Memoriam - H. Hamid Pengelola P4S "ANTANAN"	16
	P4S KOPSES Solusi Meningkatkan Kualitas SDM Petani	19
	WAHANA	
	BPP Mandiri di Kabupaten Indramayu	23
	WAWASAN	
	Penyuluhan Pertanian Kabupaten Indragiri Hulu pada Era Otonomi Daerah	27
	Pengenalan dan Penggunaan Pestisida Nabati	30
	Peranan KTNA dalam Menggerakkan Pemantapan Kelompoktani Pelaksana Insentififikasi Pertanian	33
	GEMA	
	Rekomendasi Pertanian Penyuluhan Pertanian Nasional tentang RUU Penyuluhan Pertanian	37
	Statuta Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN)	40
	Pedoman Pembentukan Komisi Penyuluhan Pertanian Propinsi (KPPP) dan Komisi Penyuluhan Pertanian Kab/Kota (KPPK)	46
	SWADAYA	
	Ramuhan Pestisida Alami	50
	Pengkatupan Kembali Panili Pecah Dalam Prosesing Alami	51
	Bio Nutrien Organik Akrab Lingkungan	53
	EM FPE Minuman Kesehatan Ternak	55
	Lahan Kelapa Sawit Untuk Memproduksi Daging	56

PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERTANIAN DALAM UPAYA REVITALISASI PENYULUHAN PERTANIAN

Untuk terwujudnya penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang produktif efektif dan efisien ditetapkan upaya-upaya pokok pengembangan penyuluhan pertanian, diantaranya (1) mengembangkan sistem penyuluhan pertanian; (2) mengembangkan ketenagaan penyuluhan pertanian; (3) program dan penyelenggaraan; serta penataan pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Dalam tulisan ini tidak dibahas mengenai kelembagaan penyuluhan pertanian, karena sudah dibahas di Ekstensia 16

1. Mengembangkan Sistem dan Penyuluhan Pertanian

Dalam sejarah penyuluhan pertanian, baru program Bimas (Usahatani Padi) yang memperkenalkan salah satu sistem penyuluhan pertanian yaitu Sistem Latihan dan Kunjungan (Training and Visit System). Sistem LAKU sebenarnya bukanlah sistem penyuluhan pertanian tetapi merupakan sistem kerja penyuluh pertanian. FAO tidak menamakan Sistem LAKU sebagai sebuah sistem tetapi sebuah pendekatan (Approach)

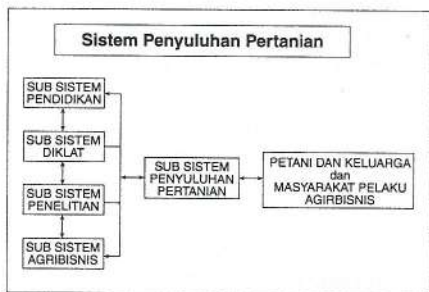
Sistem kerja LAKU ini mengatur kerja para penyuluh

pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), yaitu mengikuti latihan dan melakukan kunjungan ke petani/kelompoktani dalam satu periode waktu tertentu yang telah ditetapkan. Keberhasilan dari sistem atau pendekatan ini diukur dengan peningkatan produksi komoditi pertanian tertentu yang diprogramkan. Dalam sistem LAKU ini setiap BPP dibagi dalam wilayah – wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP) dan selanjutnya setiap WKPP dibagi menjadi wilayah-wilayah kelompoktani (WILKEL).

Ke depan dalam era otonomi daerah dan pembangunan sistem dan usaha agribisnis, maka sistem atau pendekatan penyuluhan pertanian merupakan gabungan dari pendekatan penyuluhan partisipatif (The Agricultural Extension Participatory Approach), pendekatan latihan dan kunjungan (The Training and Visit Approach), pendekatan pengembangan sistem usahatani (The Farming System Development Approach), pendekatan biaya patungan (The Cost Sharing Approach) dan pendekatan kelembagaan pendidikan (The Educational Institution Approach).

Dengan gabungan pendekatan ini maka ukuran keberhasilan penyuluhan pertanian tidak hanya diukur dengan meningkatnya produksi, tetapi juga berapa besar keterlibatan petani dan berapa besar manfaat yang diperoleh petani dari keikutsertaannya dalam kegiatan penyuluhan pertanian, serta adanya kontribusi biaya dari mereka yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan pertanian.

Secara makro sistem penyuluhan pertanian dapat digambarkan seperti gambar 1 di bawah ini.



Sistem Penyuluhan Pertanian

Semua sub sistem dalam Sistem Penyuluhan Pertanian mempunyai hubungan fungsional yang dalam operasionalnya menganut prinsip kemitrasejajaran, keterbukaan, saling membutuhkan dan saling ketergantungan satu sama lain.

Sementara itu di tingkat BPP/kecamatan, Sistem Kerja Penyuluhan Pertanian yang akan dikembangkan adalah bagaimana menghubungkan

antara Sistem Penyuluhan Pertanian dan Sistem Pemberdayaan Agribisnis. Sistem Kerja Penyuluhan Pertanian di BPP/Kecamatan adalah seperti gambar 2 berikut.



Sistem Kerja Penyuluhan Pertanian di BPP/Kecamatan

Dalam sistem kerja penyuluhan pertanian di BPP/Kecamatan ini, Sistem Penyuluhan Pertanian dihubungkan dengan Sistem Pemberdayaan Agribisnis melalui Tim Penyuluhan Pertanian BPP.

Sebagai suatu sistem pendidikan, Sistem Penyuluhan Pertanian terdiri dari unsur guru (penyuluh pertanian), program penyuluhan pertanian, prasarana dan sarana, materi dan metoda, serta petani. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di BPP/Kecamatan dilakukan oleh Tim Penyuluh Pertanian yang terdiri dari : (1) penyuluh pertanian; (2) fungsional pengendali organisme pengganggu

tanaman; (3) fungsional pengawas benih tanaman; (4) fungsional pengawas bibit ternak; (5) fungsional paramedis veteriner; (6) petani pemandu; (7) kontaktani; (8) mantri tani; (9) mantri kesehatan hewan dan (10) swasta dan LSM.



Latihan Penyuluhan di BPP

Sedangkan Sistem Pemberdayaan Agribisnis di BPP/Kecamatan terdiri dari :

1. Toko/Kios Sarana Produksi
2. Lembaga Keuangan/Permodalan
3. Agroindustri Pedesaan
4. UPJA
5. Pelayanan Informasi
6. Klinik Konsultasi Agribisnis
7. Pengaturan (Cabang Dinas)

Sistem Pemberdayaan Agribisnis di BPP/Kecamatan inilah yang akan menghubungkan Sistem Penyuluhan Pertanian di BPP/Kecamatan dengan Sistem Pemberdayaan Agribisnis di Kabupaten/Kota.

Sistem Pemberdayaan Agribisnis Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Lembaga Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota
2. Produsen Agroinput

3. Pengolah Hasil Pertanian
4. Lembaga Pemasaran
5. Lembaga Penyedia Jasa
6. Lembaga Penelitian
7. Lembaga Diklat
8. Lembaga Pelayanan Informasi
9. Lembaga Pengaturan (Dinas-Dinas)

Sistem Pemberdayaan Agribisnis di Kabupaten/Kota selanjutnya apabila diperlukan akan menghubungkan Sistem Pemberdayaan Agribisnis di BPP/Kecamatan dengan Sistem Pemberdayaan Agribisnis di Propinsi.

Dukungan dan Sistem Pemberdayaan Agribisnis di BPP/Kecamatan didasarkan atas prinsip bahwa penyuluhan pertanian merupakan bagian dari Sistem Pemberdayaan Agribisnis Petani.

Dalam sistem kerja penyuluhan pertanian ini, BPP/Kecamatan dibagi ke dalam desa-desa (dahulu WKPP) dan desa-desa dibagi dalam dusun (dahulu WILKEL). Desa-desa dan dusun ini adalah desa dan dusun yang berada di dalam satu kecamatan karena setiap Kabupaten/Kota mempunyai wewenang dan perangkat penyuluhan pertanian sendiri dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian.

Agar sistem kerja penyuluhan pertanian ini dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota digunakan instrumen sebagai berikut :

1. Pembuatan petunjuk umum
2. Sosialisasi dan dialog
3. Pertemuan-pertemuan khusus
4. Penggunaan multi media
5. Peraturan perundang-undangan
6. Bantuan dana (cost sharing).

2. MENGEMBANGKAN KETENAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN

Upaya pokok pengembangan ketenagaan penyuluh pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan kualifikasi tenaga penyuluh pertanian (PNS, swasta dan petani);
- b. Menyusun instrumen penetapan kebutuhan tenaga penyuluh pertanian sesuai dengan kondisi lokalita;
- c. Menetapkan standar kompetensi kerja penyuluh pertanian;
- d. Menetapkan pola karier penyuluh pertanian (PNS);
- e. Meningkatkan profesionalisme jiwa wirausaha, disiplin, etos kerja dan dedikasi penyuluh pertanian;
- f. Merumuskan kode etik penyuluh pertanian;
- g. Mendorong para penyuluh pertanian untuk beragribisnis sendiri (perorangan/kelompok) dengan memberikan bantuan modal dalam bentuk kredit, bagi hasil, dan penggunaan lahan BPP, lahan petani dan tanah-tanah bengkok (khusus di Pulau Jawa);
- h. Meningkatkan peran dan kemampuan penyuluh pertanian swakarsa/swasta.

Instrumen Pengembangan :

1. Pembuatan peraturan perundang-undangan yang baru
2. Pembuatan petunjuk umum

3. Sosialisasi dan dialog
4. Pendekatan-pendekatan baik melalui surat maupun kunjungan lapangan
5. Diklat- diklat
6. Pertemuan profesi
7. Bantuan anggaran (dekonsentrasi dan pembantuan).

3. MENGEMBANGKAN PROGRAM DAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN

Upaya pokok untuk mengembangkan kualitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian khususnya untuk peran aktif Pemerintah Kabupaten/Kota adalah :

- a. Menyusun pedoman penyusunan program dan program penyuluhan pertanian;
- b. Menyusun dan menerbitkan pedoman-pedoman teknis penyelenggaraan penyuluhan pertanian mengacu pada pedoman umum;



Mencari solusi lewat pemecahan masalah secara bersama

- c. Mengembangkan model-model penyuluhan pertanian partisipatif, demokratis dan kemitrasejajaran;
- d. Mengembangkan model-model agribisnis terpadu;
- e. Mengembangkan instrumen-instrumen bagi petani untuk merencanakan kegiatan usaha keluarga, kelompok dan desa;
- f. Mendorong peranserta petani dalam perencanaan pelaksanaan dan monitoring-evaluasi serta pemanfaatan hasil pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa;
- g. Mengupayakan ketersediaan prasarana, sarana dan produk informasi penyuluhan pertanian;
- h. Mengembangkan manajemen penyuluhan pertanian partisipatif;
- i. Mengembangkan jaringan kerjasama informasi penyuluhan pertanian di dalam negeri maupun luar negeri;
- j. Mendorong terbentuknya forum koordinasi antar lembaga dalam pembangunan penyuluhan pertanian;
- k. Mendorong terjalannya kerjasama dalam bentuk : pertukaran pengetahuan, keahlian, dan pengalaman; penggunaan prasarana dan sarana penyuluhan pertanian; penugasan tenaga penyuluh, dan penyediaan dana;
- l. Mengembangkan kerjasama diantara penyuluh, petani dan peneliti serta pelaku agribisnis lainnya.

Instrumen Pengembangan :

1. Pembuatan peraturan perundang yang baru;

2. Pembuatan petunjuk umum;
3. Sosialisasi dialog;
4. Pendekatan-pendekatan baik melalui surat maupun kunjungan lapangan;
5. Pertemuan regional dan nasional
6. Bantuan anggaran (dekonsentrasi dan pembantuan)

4. PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN

Upaya pokok dalam penataan pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan mekanisme pengalokasian anggaran penyuluhan pertanian dengan mengacu pada peraturan pengalokasian dana dekonsentrasi dan dana pembantuan (UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 13, PP No. 39 Tahun 2001 dan PP No. 52 Tahun 2001);
- b. Mengalokasikan anggaran untuk memperkuat kelembagaan penyuluhan pertanian dan menggerakkan tenaga penyuluh pertanian, secara bertahap akan mencakup seluruh Kabupaten/Kota dan BPP/Kecamatan;
- c. Mendorong Pemerintah Kabupaten/ Kota, swasta dan petani untuk membiayai penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- d. Mengusulkan proyek kerjasama luar negeri yang baru, terutama bantuan yang bersifat hibah atau bantuan dengan bunga pinjaman lunak.

Instrumen Penataan :

1. Pembuatan petunjuk mengenai penggunaan biaya dari Pemerintah Pusat
2. Pertemuan-pertemuan dengan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk membicarakan mengenai penyediaan anggaran khusus untuk penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
3. Pertemuan-pertemuan yang sama juga dilakukan dengan pihak swasta dan petani;
4. Membuat proposal yang menyangkut penyelenggaraan penyuluhan pertanian untuk diajukan kepada lembaga-lembaga donor/donor country.

(Dipetik dari Program Nasional Revitalisasi Penyuluhan Pertanian)

PROGRAM AKSI PENYULUHAN PERTANIAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN REVITALISASI PENYULUHAN PERTANIAN

Program aksi penyuluhan pertanian untuk mendukung pengembangan agribisnis, baik agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*), agribisnis tengah (*on-farm agribusiness*) maupun agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*) dilakukan melalui :



Salah satu kegiatan agribisnis yang mendukung

1. Penguatan Kelembagaan petani
Penguatan kelembagaan tani diarahkan dari organisasi non-

formal menjadi organisasi sosial ekonomi yang formal dan berbadan hukum, sebagai wadah untuk menumbuh kembangkan kemampuan dan kapasitas petani/kelompok dan organisasi petani lainnya dalam aspek manajemen organisasi dan manajemen usaha guna memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup secara mandiri. Oleh karena itu optimalisasi pembinaan kelembagaan tani difokuskan pada aspek struktur, aspek dinamika (fungsi), dan aspek manajemen dan kepemimpinan.

2. Penyelesaian dan Pelayanan Informasi dan Teknologi Agribisnis
Upaya pengembangan pelayanan informasi dan teknologi agribisnis membutuhkan pengelolaan sumber daya informasi yang

memadai dengan kapasitas yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan pelayanan informasi yang dibutuhkan.

Upaya pengembangan tersebut antara lain dilakukan melalui beberapa pendekatan berikut :

- a. Optimalisasi pemanfaatan unit informasi dan teknologi yang tersedia;
 - b. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia (petani, petugas/penyuluh pertanian);
 - c. Peningkatan ketersediaan sarana untuk pengembangan media;
 - d. Peningkatan jejaring, penyediaan dan pelayanan informasi dan teknologi;
 - e. Penyediaan informasi melalui pemanfaatan multi media.
3. Pengembangan kemitraan Usaha Agribisnis
- Pengembangan kemitraan usaha agribisnis diarahkan untuk



Penyuluhan dalam rangka peningkatan ketrampilan

meningkatkan posisi tawar petani dan kerjasama yang saling menguntungkan sehingga terwujud efisiensi dan keberlanjutan usaha. Untuk itu para penyuluh dan petani perlu dibekali dengan kompetensi di bidang kewirausahaan agribisnis sehingga mampu meningkatkan akses dan kerjasama dengan berbagai lembaga pelayanan agribisnis dan *stakeholders* guna memanfaatkan peluang usaha yang tersedia.

4. Peningkatan Kompetensi Penyuluh Pertanian

Peningkatan kompetensi penyuluh pertanian dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan para penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian.

Peningkatan kompetensi penyuluh pertanian dilakukan melalui kegiatan diklat, dukungan informasi, penyediaan perpustakaan, temu-temu dan studi banding serta mengembangkan lingkungan kerja yang memotivasi. Peningkatan kompetensi ini juga mencakup penyuluh pertanian swakarsa (petani) dan penyuluh pertanian swasta (perorangan dan perusahaan).

Dipetik dari Program Nasional Revitalisasi Penyuluh Pertanian

IN MEMORIAM

H.Oyon Tahyan PETANI PEMIMPIN; PEMIMPIN PETANI

Siapa yang tidak kenal H. Oyon Tahyan, sosok pemimpin petani-nelayan. Ia dikenal oleh masyarakat petani nasional, bahkan sudah melebar ke lintas sektor di tingkat nasional. Sejak tahun 1984 ketika Indonesia dicanangkan sebagai negara dunia ketiga yang berhasil mencapai swa sembada beras, nama Oyon Tahyan pun ikut “go internasional” dikenal di Manca Negara.



H. Oyon Tahyan pada PENAS X di Tasikmalaya

Siapakah H. Oyon Tahyan ? Ia pernah menduduki jabatan MPR/DPR-RI 1992-1997 dari daerah pemilihan Jawa Barat. Namun bukan cuma itu, H. Oyon Tahyan telah empat periode atau

empat kali pemilihan mendapat kepercayaan untuk menjadi anggota Majelis yang terhormat itu, yakni sejak periode tahun 1977-1982 hingga 1998. Sungguh suatu prestasi yang “bukan main” Terlebih lagi karena H.Oyon Tahyan adalah seorang petani yang hanya tamatan HIS atau setara Sekolah Dasar. Memang sebuah prestasi gemilang yang tidak sembarang orang bisa meraihnya.

H. Oyon Tahyan yang lahir di Rajapolah-Tasikmalaya Jawa Barat pada tanggal 20 Agustus 1924, memang terlahir untuk menjadi petani pemimpin dan menjadi pemimpin petani. Menelusuri jejak penelitian kariernya sebagai pemimpin petani, sungguh kita harus angkat topi. Karena itu.ektensia sengaja menampilkannya untuk mengenang karier dan perjuangannya H.Oyon Tahyan, sehingga dapat diteladani oleh para pemimpin petani lainnya terutama generasi muda calon-calon penerusnya. Sejak masa kanak-kanak, Oyon kecil yang masih sekolah di Sekolah Desa

yang kemudian pindah ke Ciawi setelah disana berdiri HIS, memang sudah menyukai dan menyenangi bidang pertanian. Ia memelihara ayam, itik, burung merpati dan sangat hobi bercocok tanam menanam segala kacang-kacangan, bawang-bawangan, jagung dan tanaman lainnya. Keinginan untuk mencoba sendiri dan mengamati hasil-hasil tanaman yang dilakukannya sendiri itu menyebabkan orang-orang didesanya menjulukinya “Tuan Coba”. Untuk mengembangkan hobinya itu, “Uyut Sewi” uyut angkat (istri Kepala Desa) yang membesarkan Oyong kecil ini sengaja menyerahkan sebagian lahan sawah dan pekarangannya ditanam kelapa untuk dikelolanya. Dan dari hasilnya itu Oyong kecil diharuskan belajar membiayai kebutuhannya sendiri.

Secara kebetulan, lahan yang dikelola Oyong kecil ini berada di pinggir jalan desa, sehingga sangat strategis menjadi “tontolan” bagi para petani disekitarnya. Saat itu tanpa disadari, lokasi penyaluran hobi “Tuan Coba” ini sudah berfungsi seperti Demplot, jadi tempat percontohan bagi para petani sekiranya. Banyak petani bertanya dan meminta benih atau bibit tanaman yang ditanam oleh “Tuan Coba” itu.

Jaman Jepang, ketika usianya mencapai \pm 18 tahun, Oyong Tahyan mengikuti kursus Tani Desa dan menjadi

peserta paling muda saat itu. Oyong semakin mantap melakukan percobaan dalam aneka usahatani pada lahan yang diberi dari Uyut Sewi, dan mengembangkannya sebagai lahan percontohan. Pada saat tertentu sengaja mengundang para petani ke lahannya untuk melihat hasil dari usahanya. Sekarang pola atau cara seperti itu kita kenal sebagai metoda penyuluhan “temu lapang”.

Disamping melakukan kegiatan “percobaan” dan “percontohan/demplot” aneka usahatannya, Oyong remaja aktif pula menjadi pelatih pandu di jaman Jepang jamannya **Seinendan** dan **Kaibodan**. Oyongpun aktif jadi pelatih baris-berbaris dan tiso. Karena aktifitasnya itu, camat Uping berkenan memberi peluang kepada Oyong untuk magang di kantor kecamatan. Oyong setuju, dengan syarat jangan diangkat menjadi pegawai kecamatan karena ingin tetap menjadi petani. Dengan kedudukannya sebagai pemegang di kantor kecamatan, Oyong remaja ini semakin berpeluang mengembangkan bakat kemampuannya. Di saat para petani mengalami serangan hama tikus, Oyong remaja itu berprakarsa untuk melakukan gerakan pemberantasan hama tikus dengan metode “setor buntut”. Di aspek lainnya, Oyong-pun mengembangkan sistem pengamanan

kampung dari gangguan maling dengan sistem ronda yang sekarang dikenal dengan sistem siskamling.

Suatu hari Oyon remaja ini di terima menjadi siswa di Sekolah Perkebunan di Malang, namun keinginannya untuk bersekolah ini tidak disetujui oleh kakek angkatnya, Aki Yuda Wisastra. Alasannya buat apa sekolah pertanian tinggi-tinggi dan jauh-jauh sampai ke Malang segala. Kalau ingin pandai bertani tidak usah jauh-jauh, belajarliah langsung kepada petani yang sudah berhasil di sini. Dengan cara itu, tidak usah meninggalkan kampung halaman dan dapat terus mengolah hasil lahan sambil belajar. Dengan petunjuk sang kakek angkat itu, Oyon remaja tidak jadi sekolah, tapi belajar bertani kepada petani yang berhasil diwilayahnya. Ia belajar bertani kepada Aki Endi, belajar beternak kepada Abah Aminta dan belajar beternak ikan kepada Aki Udin, yang telah berhasil dibidangnya masing-masing.

Karena kepemimpinnya yang menonjol, Oyon Tahyan sempat diangkat sebagai juru penerangan disaat waktu kampanye Negara Kesatuan RI. Dari keberhasilannya itu ia diangkat Kepala Dinas penerangan kecamatan



H. Oyon Tahyan pada rapat persiapan PENAS X di Tasikmalaya

Cisayong. Dengan kedudukannya sebagai pegawai penerangan, kepada masyarakat, ia-pun aktif memberikan penerangan pertanian bersama mantri tani di wilayahnya. Karena kecintaannya kepada pertanian di tahun 1955 ia berhenti jadi pegawai dengan permohonan sendiri. Itupun baru dapat dikabulkan setelah Oyon mengajukan permohonan berhenti yang ketiga kalinya.

Setelah kembali jadi petani, Oyon lebih leluasa untuk mengembangkan bakat kemampuannya untuk pemimpin para petani di kampung Pukes. Berbagai kegiatan dilakukannya di antaranya memerangi buta huruf, membangun jalan kampung secara gotong-royong, mengembangkan upaya pemanfaatan pekarangan dengan apotik hidup, dan warung hidupnya. Itu dilakukannya di

tahun 60-an sebelum lahirnya program PKK.

Keberhasilannya dalam menggerakkan masyarakat petani dalam pembangunan lingkungannya mengantarkan Oyon Tahyan diangkat sebagai Ketua Pembangunan Wilayah kecamatan Rajapolah. Salah satu aktifitas yang sangat membekas di hati Oyon Tahyan pada periode ini ialah kegiatan menyelenggarakan pengumpulan dana melalui pementasan sandiwara dan undian berhadiah untuk pembiayaan pembangunan SMP secara swadaya.

Di tahun 1963 ketika mulai diperkenalkannya varietas padi VUTW PB-5 dan PB-8, kecamatan Rajapolah-pun seperti daerah lainnya dibebani target luasan areal tanam tertentu. Oyon Tahyan selaku tokoh tani di wilayahnya diminta oleh Camat untuk merancang penyuluhan kepada para petani, dan kemudian keluarlah ide cemerlangnya. Dengan persetujuan atau legitimasi dari Pak Camat, Oyon Tahyan mewujudkan gagasannya dengan menyelenggarakan kursus tani bagi 5 orang tokoh dari setiap desa. Kursus diselenggarakan langsung di sawah milik Oyon Tahyan setiap 2 kali seminggu (minggu dan kamis), selama 10 minggu. Selesai kursus para pesertanya membangun kesepakatan membuat Rencana Tindak Lanjut berupa gerakan lomba penanaman padi varietas

unggul tahan wereng PB-8 disetiap RT di wilayahnya. Seluruhnya mencapai 350 RT se kecamatan Rajapolah. Dengan demikian seluruh peserta kursus merasa terpacu untuk mengadu prestasi dengan jalan membina RT binaannya secara sungguh-sungguh di desanya masing-masing. Lomba ini mendapat tanggapan positif dari Bupati Tasikmalaya yang secara spontan merespon akan memberi hadiah sepasang kerbau kepada pemenangnya. Lombapun semakin semarak manakala dilaporkan kepada Gubernur Jawa Barat yang juga hadir pada saat pembagian hadiah dan pengumuman pemenangnya. Pada waktunya, Gubernur Jawa Barat saat itu membawa hadiah-hadiah bagi para pemenangnya berupa alat-alat pertanian sebanyak satu truk.

Bupati Tasikmalaya sangat berkesan akan gagasan Oyon Tahyan yang telah diwujudkan di kecamatan Rajapolah ini dan meminta Pak Oyon untuk menyebarkan pola gagasannya itu ke seluruh kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. Itulah saat pertama kalinya Pendopo Kabupaten digunakan kursus tani bagi kepala desa dan tokoh-tokoh tani di Kabupaten Tasikmalaya. Melalui gerakan itu, Tasikmalaya merupakan kabupaten yang dinilai sangat berhasil dalam pemasyarakatan pada varietas PB5-PB8 di Jawa Barat. Karena

keberhasilannya itu pula maka Solihin GP yang pada waktu itu menjabat Gubernur Jawa Barat berkenan memanggil Oyon Tahyan ke tingkat propinsi untuk berkampanye bersama Dinas Pertanian ke kabupaten-kabupaten lainnya di Jawa Barat.

Gejolak semangat kepemimpinan ternyata tidak berhenti sampai disini, ditahun 1970 Oyon Tahyan mempepori pembentukan Badan Musyawarah Kontaktani-nelayan (Bamukti) di Kabupaten Tasikmalaya, dan terpilih menjadi ketuanya. Kemudian ditahun 1971 mewujudkan Pekan Nasional Pertemuan Kontaktani-nelayan yang ke I di Cihea yang dihadiri oleh para kontaktani-nelayan se Indonesia. Disaat itu pulalah Oyon Tahyan terpilih menjadi Ketua Bamukti tingkat Nasional.

Ide atau gagasan untuk mengumpulkan para kontaktani se Indonesia ini mencuat dalam pikiran Oyon Tahyan karena menurutnya keterbelakangan yang dialami oleh para petani-nelayan kita terutama di sebabkan karena sempit atau tertutupnya wawasan mereka, ibarat katak dalam tempurung. Semangat dan kecintaannya kepada petani inilah yang mendorong Oyon Tahyan untuk senantiasa tampil paling depan dalam setiap upaya memerangi keterbelakangan patani-nelayan, membuang tempurung yang menyesakkan dan membodohkan para petani-nelayan.

Kepemimpinan Oyon Tahyan yang dilandasi cita-cita untuk memajukan petani ini ternyata memperoleh perhatian dan kepercayaan Menteri Pertanian, Bapak Thoyib Hadiwijaya yang merespon dengan meminta Pak Oyon untuk membantu Pak Affandi dan Pak Salmon Padmanagara menyukseskan program BIMAS. Sejak itulah Oyon Tahyan menjadi duta petani berkeliling di seluruh pelosok di tanah air untuk menggelorakan semangat para petani guna mencapai swasembada beras.

Empatinya yang tinggi terhadap masyarakat yang ditimpa kesengsaraan dan kelaparan telah menggelitik nuraninya dan menyembulkan sedua ide atau gagasan untuk mewujudkan rasa syukur para petani Indonesia atas keberhasilan meraih swasembada beras ini, dilakukan melalui karya nyata Sumbangan bantuan pangan bagi rakyat Afrika yang tengah dilanda musibah kelaparan akibat kekeringan yang panjang. Inilah salah satu gagasan dan kepeloporan Oyon Tahyan yang "mendunia" dan terus berjalan melalui pengembangan program magang bagi para petani Afrika yang mendapat tanggapan dan nilai positif dari mata dunia.

Menelusuri jejak langkah penelitian karier kepemimpinan H.Oyon Tahyan menjadi pemimpin yang memimpin

petani ini, maka wajarlah apabila yang bersangkutan memperoleh segudang tanda jasa dan penghargaan serta kepercayaan untuk menduduki jabatan-jabatan penting diberbagai organisasi. Sosok petani pemimpin yang satu ini memang tidak pernah kering dan kehabisan ide, gagasan dan prakarsa, serta keinginan yang kuat untuk mewujudkannya menjadi karya yang nyata. Ia senantiasa dinamis, tidak pernah mau berhenti dan puas di saat satu ide telah terwujud, dalam satu karya besar sekalipun, namun terus dan terus maju seolah tak pernah mengenal kata akhir.

Karya-karyanya yang orisinal seperti pengembangan metoda percontohan dari "Tuan Coba" ini dikemudian hari dikenal dengan metoda demplot telah ia lakukan jauh sebelum metoda demplot ini dimasyarakatkan. Demikian pula dengan gerakan penanaman varietas padi PB-5 dan PB-8nya yang diawali dari kursus tani, magang dan penerapan dalam areal yang lebih luas di tiap RT (sekarang kita kenal dengan metoda Demfarm) serta lomba usahatani. Kesemuanya itu muncul secara orisinal dari otak dan jiwa seorang petani. Padahal petani tersebut yang hanya tamatan HIS, namun memiliki jiwa yang bebas merdeka dan mandiri serta tampil eksis dengan penuh percaya diri serta serius dalam bidang yang

ditekuninya. Karena ia seorang petani, karya-karya besar yang telah diraihinya itu ternyata senantiasa tampil dalam sebuah kesahajaan seorang petani, meski dengan segudang prestasi.

Rentang waktu yang telah dijalani rasanya telah cukup untuk proses belajar bagi para pemimpin petani generasi berikutnya, keteladanan Oyon Tahyan seyogyanya harus sudah beranak pinak dengan kemunculan Oyon-Oyon yang baru dari generasi penerusnya.

Menelusuri jejak langkah karir kepemimpinan H. Oyon Tahyan menjadi pemimpin yang memimpin petani ini, maka wajarlah apabila yang bersangkutan memperoleh segudang tanda jasa dan penghargaan serta kepercayaan untuk menduduki jabatan-jabatan penting di berbagai organisasi. Penghargaan Pemerintah dan tanda jasa yang pernah diterimanya adalah Bintang Maha Putra Nalapraja dan Satya Lencana Pembangunan serta penghargaan dan tanda jasa dari pemerintah Korea Selatan. Terakhir pada acara peringatan Hari Krida Pertanian Pak Oyon mendapatkan Lencana Emas dari Ketua Umum KTNA Nasional.

Masih banyak lagi sepak terjang beliau yang tak dapat kita sebut satu persatu, yang jelas kita yakin kepergiannya pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2003 telah cukup membawa bekal. Karena jejak langkah dan bekas

tangan H. Oyon Tahyan telah memberi kehangatan dan cahaya di hati. Tak mudah melupakannya, terutama oleh para teman-teman seperjuangannya di Kelompok KTNA Nasional, Kelompok yang menjadi wadah untuk menyuarakan hati dalam memperjuangkan hak dan nasib para petani Indonesia

Satu lagi yang rasanya sayang untuk dilewatkan dari pengamatan kita semua, yakni mengenai kondisi iklim penyuluhan pertanian dimasa lalu dijamannya Oyon Tahyan muda, ternyata di saat itu iklim penyuluhan pertanian benar-benar mampu menciptakan iklim dan kondutif untuk muncul dan

berkembangnya berbagai ide, gagasan, kepeloporan dan kepemimpinan serta karya-karya yang muncul dari sosok petani. Peranan aparaturnya seperti yang dituturkan oleh Oyon Tahyan dalam penuturan sejarah karirnya itu, ternyata sejak mulai Kepala Desa, Camat, Bupati, Gubernur sampai Menteri-nya terkesan sangat akomodatif serta berperan sebagai pemberi aspirasi, gagasan, karsa, dan karya yang muncul dari bawah, dari petani.

Selamat jalan Pak H.Oyon Tahyan, semoga Allah S.W.T membalas semua jasa-jasamu.Amin.

(Sumber : Ekstensia volume 5 1997)

IN MEMORIAM

H. HAMID PENGELOLA P4S “ANTANAN”

H.HAMID, dilahirkan pada tahun 1951 dari keluarga Bpk. H. Tajudin dan Ibu Hj. Sopiah yang berdomisili di kampung Tarikolot II Ds. Cimande, Kec. Caringin, Kab. Bogor.

Pemuda lulusan SLTA tahun 1971 beserta orang tuanya meniti karir dibidang pertanian dan hasilnya bisa dinikmati untuk menunaikan Ibadah Haji pada tahun 1977 diusianya yang relatif muda.

Beliau dikenal sebagai pemuda tani yang berhasil dan mau bekerjasama dengan kawan petani disekitar kampung kelahirannya, yang pada akhirnya membentuklah kelompok tani yang diberi nama **SILUMAN** (sisa modal tambah lumayan) pada tahun 1975 beranggotakan 20 orang. Sesuai dengan perkembangan jaman pada tahun 1978 kelompok tani **SILUMAN** berubah nama menjadi **MEKAR** (menuju

keluarga sejahtera), namun kelompok itupun hanya bertahan hingga tahun 1980, lalu diganti menjadi kelompok tani **ANTANAN** (anak petani nanharapan). Hingga saat ini beranggotakan 30 orang.



H. Hamid memperhatikan peserta sedang membuat bokashi

Nama **ANTANAN** diambil dari rumput liar yang tumbuh di pematang sawah/ladang yang suka dimanfaatkan untuk lalab (dimakan mentah) dan obat.

Dari manfaat itulah oleh kelompok tani “**ANTANAN**” dijadikan sebagai filosofi bahwa antanan adalah tumbuhan liar di pematang sawah/ladang yang suka diinjak-injak tapi tidak mati bahkan bisa dijadikan lalab atau obat. Ini terbukti pada saat krisis yang berkepanjangan disektor pertanian kelompok Antanan mampu bertahan.

H. Hamid sebagai petani muda yang haus informasi dan cepat mengadopsi teknologi baru menjadi kader penggerak,

pembangunan pertanian di desanya. Beberapa komoditas pertanian diintegrasikan menjadi usaha tani terpadu yang saling berkaitan sehingga dapat meningkatkan pendapatan usaha taninya. **H. Hamid** sebagai pecinta

lingkungan yang sehat, selalu bekerja dan mengajak kelompoknya untuk memanfaatkan limbah ternak dan tanaman menjadi pupuk organik.

Kerja keras dan kreativitas **H. Hamid** akhirnya dapat kepercayaan dari pemerintah pada tahun 1994 untuk mempelajari pembuatan **BOKASHI** ke Bangkok Thailand. Keberangkatannya

didukung oleh pemerintah daerah Kabupeten Bogor. Dengan bekal ilmu dari Thailand ini, dikembangkan pembuatan bokashi untuk berbagai jenis tanam, sehingga dia mendapat julukan “bapak pupuk organik”. Bahkan pembuatan Bokashi dijadikan komoditas unggulan P4S “Antanan”.

Mengapa beliau mengembangkan bokashi ? Karena tanaman yang di pupuk bokashi menunjukkan peningkatan jumlah hasil yang berkualitas, terbukti hasilnya dapat dipasarkan di supermarket **INDOMARCO** Jakarta dengan daya saing tinggi. Pupuk organik Bokashi yang diproses dari limbah ternak dan tanaman

untuk mendukung kesuburan tanah yang akrab lingkungan, akan menyebabkan tanaman yang diusahakannya lebih subur, serta dapat menekan biaya produksi, biaya yang dikeluarkan oleh petani relatif lebih kecil.



H. Hamid beserta Menteri Pertanian Malaysia dan Bapak Dr. Ir. Ade Juhara

Tanaman Salak Pondoh yang bibitnya berasal dari Sleman, Jogja dicoba ditanamnya dengan menggunakan pupuk bokashi. Ternyata hasilnya bagus dan rasanya pun mirip dengan rasa Salak Pondoh asli Sleman. Produksi Salaknya terkenal dengan nama "Salak Slebor", salak yang berasal dari Sleman ditanam di Bogor. Dengan ditanamnya salak "slebor", peserta yang magang di P4S "Antanan" tidak hanya belajar bokashi, tetapi belajar juga cara

menanam salak pondoh dengan menggunakan bokashi. Sudah banyak yang magang di tempat H. Hamid ini, tidak hanya berasal dari Bogor saja, tetapi dari kabupaten lain di Jawa Barat dan propinsi lain. Hampir seluruh dari

propinsi yang datang, bahkan dari luar negeri.

Demikianlah hari demi hari kesibukan bapak H. Hamid, sebagai pengelola P4S, maupun sebagai pencari dan penyebar informasi kepada para petani. Banyak pula yang berkonsultasi dan yang berkunjung, tidak hanya petani. Ada yang berasal dari Perguruan Tinggi, dari Balai

Penelitian, ada pula pengusaha. Selain itu bahkan juga membantu petani sekitar memasarkan hasil usaha taninya lewat kelompok. Berdasarkan kualitas hasilnya, dipasarkan ke supermarket dan pasar tradisional.

Sekarang H. Hamid telah tiada, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2003. Tinggal penerusnyalah yang harus melanjutkan usahanya.

Semoga segala amal ibadahnya diterima. Amin. (FS)

P4S KOPSES

SOLUSI MENINGKATKAN KUALITAS SDM PETANI

Siapa sangka dibalik kesederhanaan dalam berpenampilan, ternyata menyimpan cita-cita yang mulia. “Ingin memberdayakan pemuda – pemuda santri di lingkungannya, untuk bisa mengisi kehidupan yang lebih mempunyai arti tanpa harus menjadi beban orang tua”. Itulah sosok **A. Tohawi Husnulloh, SH** yang menetapkan pilihan sektor pertanian sebagai kiprah hidup yang akan ditekuninya. Rintisan awal meninggal-



A. Tohawi Husnulloh, SH. Pengelola P4S KOPSES

kan jabatan sebagai Kepala Bagian Personalia suatu perusahaan swasta di Jakarta, lalu bergabung dengan teman-teman karang Taruna desa Cibeuteung Muara, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Tepatnya tanggal 28 Oktober 2000, bersama 11 orang taruna tani mendirikan Kelompok Tani Pemberdayaan Sosial Ekonomi Santri yang disingkat dengan nama KOPSES.

Menyadari rendahnya kualitas SDM petani baik dalam ketrampilan maupun daya nalar yang dimiliki petani, menghantarkan pemuda Tohawi mencari informasi ke instansi terkait, guna mencarikan solusi untuk peningkatan SDM petani. Setelah bertemu **Ir. Ata Harja** dari KIPPK Bogor tahun 2000 lalu, bapak sepasang putra ini bertekad mendirikan P4S tepatnya pada tanggal 8 Januari 2001 sekaligus menjadi pengelola dari P4S yang diberi nama P4S KOPSES. Sebagaimana umumnya P4S yang lain, P4S KOPSES mengawali kegiatan awal dengan budidaya ikan gurame mulai rintisan 3 ekor induk dan seekor pejantan seharga ± Rp. 700.000,-. Kini telah berkembang menjadi beberapa kolam yang berisikan 30.000 benih ikan gurame siap pasar bagi petani ikan tahap pemeliharaan ikan konsumsi.

Dengan memanfaatkan lahan tidur yang ada disekitar lokasi P4S, fasilitas kebutuhan pelatihan secara sederhana telah dipenuhi, antara lain sekretariat dan ruang belajar, mushola, dapur umum dan lahan usaha serta MCK telah tersedia.

Hanya saja untuk sementara ini mushola merangkap menjadi ruang belajar karena roboh akibat angin kencang. Untuk keberlangsungan kegiatan P4S KOPSES, program kegiatan usahanya dengan melibatkan petani lokal di desa Cibeuteung Muara, yang meliputi usaha budidaya air tawar (gurame, lele, sepat), ternak ayam kampung ramah lingkungan, ternak itik, domba, tanaman obat dan sayuran (ketimun, kacang panjang, kacang tanah). Dari administrasi yang ada, beberapa petani telah mengikuti pelatihan magang dengan primadona

andalan adalah budidaya gurame. Peserta pelatihan berasal dari daerah Bogor sendiri maupun di luar Bogor seperti Aceh, Papua. Tujuan mereka untuk menimba ilmu budidaya ikan gurame, mulai mengenal ikan gurame sampai dengan terampil mengelola budidaya gurame. Lamanya magang bila sampai terampil adalah 5 hari.

Perjalanan waktu memberikan pengalaman tersendiri bagi pengelola P4S KOPSES untuk bisa membentuk kualitas SDM petani sebagai andalan dalam mengelola usaha tani. Tidak cukup hanya dengan keterampilan saja, tetapi diperlukan pula stimulus melalui pendidikan formal karena umumnya petani masih rendah tingkat pendidikannya. Hal inilah yang menjadi kendala bagaimana petani bisa berperan sebagai pelaku agribisnis jika pengetahuannya masih minim.

Karenanya perlu adanya solusi yang dapat menolong petani. Kondisi yang demikian menjadi keprihatinan bagi pengelola P4S KOPSES, apalagi didukung dengan pengarahan Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian Dr. Sinis Munandar dalam suatu pertemuan di PMPSDMP Ciawi



Sekretariat P4S KOPSES

2001 lalu yang menjelaskan keprihatinan dengan tingkat pendidikan petani. Merasa terganggu dan menyadari benar perlunya pendidikan formal bagi petani untuk bisa melakukan posisi tawar, maka diwujudkan oleh pemuda kelahiran Bogor 32 tahun lalu ini dengan berbuat nyata untuk meningkatkan kualitas SDM petani di lingkungan P4S melalui kegiatan magang petani yang bernafaskan paket A, B dan C. Pelaksanaannya dilakukan diantara kegiatan magang. Kegiatan ini sekarang menjadi citra P4S KOPSES.

Belajar melalui paket A, B dan C yang selama ini kita kenal sebagai pemberantasan buta huruf dan menjadi bimbingan Dinas Pendidikan, bukan menjadi kendala bagi peserta magang di P4S KOPSES. Terbukti ± 85 peserta menjadi binaan di paket A dan B. Abeng 32 th misalnya, salah seorang peserta paket A yang telah berhasil lulus menjelaskan bahwa sekarang memiliki percaya diri dalam melakukan aktivitas sehari-hari sebagai pelaku pemasaran hasil produksi pertanian untuk bernegosiasi dengan pembeli/konsumen. Bahkan Abeng tertarik ingin melanjutkan ke paket berikutnya. Fasilitator magang petani nuansa paket A, B dan C ini dilakukan oleh petani yang mempunyai keahlian komoditi dan tidak menutup kemungkinan peserta paket menjadi fasilitator sepanjang yang bersangkutan mempunyai keahlian

dibidangnya. Sedangkan untuk materi umum diajarkan oleh guru yang telah ditunjuk Dinas Pendidikan sebagai penanggung jawab pelaksanaan kejar paket bagi masyarakat

Sebagaimana kita maklumi pada pembelajaran kejar paket A, B dan C mempunyai koridor yang harus dipenuhi, yaitu bagi peserta yang belum mempunyai ijazah SD diwajibkan ikut kejar paket A dst. Hal ini juga diberlakukan bagi peserta paket A, B dan C yang terkoordinir di P4S KOPSES. Kegiatan ini merupakan suatu langkah yang harus didukung oleh pihak-pihak lain dan ditiru oleh pemerhati nasib petani dengan memberikan bantuan sumbangan untuk keberlangsungan kejar paket A, B dan C bagi petani yang sangat mulia dalam meningkatkan kualitas SDM petani, karena peserta paket dibebaskan dari biaya.

Sadar akan letak desa Cibeuteung Muara dengan Jakarta yang tidak begitu jauh, dan membaca peluang emas terbuka untuk menjadi pemasok bahan pangan bagi konsumen Jakarta, menjadikan Motto P4S KOPSES dalam berusaha tani adalah :

- 1). Memanfaatkan tanah secara maksimal untuk ditanami tanaman.
- 2). Memanfaatkan secara maksimal sampah untuk tanaman, ternak dan ikan.
- 3). Tak ada satu detik pun menganggur tanpa mengelola lahan



Kolam ikan P4S KOPSES

Belajar dari membaca keinginan masyarakat tani, keinginan hidup sejahtera, yang hanya dapat ditempuh melalui pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan keluarga akan tercapai bila terindikasi dari sejahtera pangan, sandang dan sejahtera papan. Tak dapat dipungkiri tahapan kesejahteraan hanya dapat dicapai apabila tingkat pendidikan petani memenuhi persyaratan handal yang dapat dengan mudah menerima inovasi teknologi. Namun yang ada dilapangan umumnya pendidikan petani jauh dari harapan. P4S KOPSES sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang pertanian dan pedesaan yang dikelola pemuda A. Tohawi SH selaku pengelola P4S secara swadana, perlu kita acungi atas dengan kepeduliannya pengelola meningkatkan kualitas SDM

petani. Kegiatan ini didukung dengan adanya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) guna terciptanya peningkatan pendapat keluarga tani sejahtera. Kepedulian pada peningkatan SDM petani digambarkan dalam tujuan P4S KOPSES yang meliputi :

1. Turut serta meningkatkan kualitas SDM petanian dan

pedesaan

2. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pertanian
3. Menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha
4. Meningkatkan sikap profesionalisme kewirausahaan masyarakat pertanian dan pedesaan.

Melalui visi dan misi yang dimiliki P4S Kopses yaitu visi P4S terwujudnya masyarakat pertanian yang maju, mandiri dan sejahtera dan misi yang dianut P4S KOPSES adalah :

1. Meningkatkan peran serta dalam pembangunan pertanian dan pedesaan
2. Meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat pertanian melalui peningkatan SDM petani. (Priwanti)

BPP MANDIRI DI KABUPATEN INDRAMAYU

Kabupaten Indramayu yang terletak di pantai Utara Jawa Barat terdiri dari 28 kecamatan. Salah satunya adalah Kecamatan Sliyeg yang terdiri dari 16 desa. Luas wilayahnya sekitar 60 km², sebagian besar terdiri dari lahan sawah irigasi. Komoditas yang dominan adalah tanaman pangan, yaitu padi (sebagai sentra produksi padi), palawija, sayuran dan mangga. Bahkan ada 70 hektar lahannya merupakan sentra pengembangan mangga gedong gincu. Ketinggian tanahnya 6 – 7,5 meter di atas permukaan laut. Jumlah kelompok tani di Kecamatan Sliyeg ada 56 kelompok. Kelembagaan yang ada di Kecamatan Sliyeg terdiri dari 2 Kantor KUD, 2 Kantor BRI, 1 Kantor Poskeswan, 6 pasar, dan 1 bengkel Alsin.

Tidak sulit untuk mencapai BPP, lokasinya di tepi jalan raya Sleman, sekitar ± 3 km dari Jatibarang, Bangunannya terlihat cukup kokoh,



Kantor BPP Mandiri di Kecamatan Sliyeg

tetapi proses pembangunannya belum selesai. Menurut Ketua Kontaktani Kecamatan Sliyeg, Bapak Sumardjo : “Yang penting dindingnya dan atapnya dulu, sehingga bisa digunakan untuk kegiatan petani. Proses pembangunan selanjutnya akan dilakukan bertahap sesuai dengan kemampuan”.

BPP Mandiri

Keistimewaan BPP di Kecamatan Sliyeg ini adalah merupakan BPP mandiri, BPP yang dibangun oleh petani, baik prakarsanya maupun dananya. Bangunan BPP ini bisa terwujud berkat keinginan keras para petani, yang didukung oleh pemerintah daerah.

Sebagai Ketua KTNA Kecamatan Sliyeg adalah **Bapak Sumardjo**. Bapak Sumardjo ini benar-benar seorang ketua yang sangat mengharapkan kemajuan petani, baik dalam kepemimpinannya maupun kemajuan dalam usahatani.

Orangnya kecil, tapi bicaranya tegas, dan mempunyai banyak keinginan dalam membangun pertanian di wilayahnya. Bahkan Koordinator Penyuluh di BPP menyatakan bahwa Pak Sumardjo adalah manusia langka. Beberapa jabatan disandangnya, yaitu sebagai Ketua KTNA Kecamatan, sebagai wakil Ketua KTNA Kabupaten, pengurus KTNA Propinsi, dan sebagai Ketua Asosiasi UPJA Propinsi Jawa Barat.



Ketua KTNA Kecamatan Sliyeg, Bapak Sumardjo

Bapak Sumardjo ini asli Indramayu, mempunyai dua orang anak. Anak pertama sudah lulus SLTA, dan anak kedua baru kelas dua Sekolah Dasar. Menurutnya, sengaja mempunyai anak dua agar menjadi contoh, sehingga yang lain bisa mengikuti program keluarga berencana. Katanya kalau anak sedikit bisa membentuk keluarga sakinah, mawadah dan warahmah. Serta akan lebih bisa berperan dalam kegiatan masyarakat karena tidak terlalu sibuk dengan mencari nafkah.

Kepada penulis beliau berceritera tentang pembentukan BPP. “ Kami sangat membutuhkan gedung BPP untuk tempat pertemuan petani dan untuk latihan. Kalau ada masalah cepat terselesaikan, dan rasanya tak mungkin petani bisa meningkat kemampuannya tanpa penyuluh. Penyuluh itu menguasai teknologi pertanian. Semula kami sewa/

kontrak bangunan. Tetapi karena bangunan akan digunakan, kami kontrak bangunan lain..Kejadian seperti ini berkali-kali, bahkan sampai 7 kali berpindah tempat. Karena lelah berpindah-pindah, seperti kucing beranak, maka kami putuskan kami ingin punya bangunan sendiri. Kami kumpulkan uang dari anggota, alhamdulillah bisa terkumpul untuk membeli tanah seluas 364 m² . Untuk bangunannya, kami mendapat bantuan dari Bapak Bupati. Tapi karena masih perlu tambahan, kami meminjam uang, sampai sekarang masih dalam proses pelunasan. Mudah-mudahan panen yang akan datang bisa lunas. Pelunasan tertunda karena panen tahun ini banyak yang gagal. Yang bekerja membangun bangunan BPP juga petani, bekerjanya bergilir sehingga dilakukan penjadwalan. Alhamdulillah dukungan, pemerintah daerah sangat membantu kami, baik dari Bapak Camat, ataupun Bapak Bupati.

Dikatakannya pula bahwa kepandaian petani dan kemampuan petani tidak sama. Untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan mereka sangat diperlukan penyuluh, dan diharapkan kemampuan petani di Kecamatan Sliyeg bisa sama pada waktu yang akan datang. Karena itulah sangat diperlukan BPP. Bangunan kantor Balai Penyuluh Pertanian ini selain digunakan untuk BPP, juga digunakan Kantor Sekretariat KTNA, dan Kantor Cabang Dinas Sliyeg. Sehingga sehari-hari terlihat kesibukan petani, kesibukan penyuluh, dan petugas Dinas . Kelihatan mereka adalah satu kesatuan walaupun

bangunan tidak luas, hanya $\pm 90 \text{ m}^2$. Ini diperkuat oleh pernyataan pak Sumardjo. " Apabila Dinas mempunyai program, KTNA pasti diundang dan apabila KTNA mempunyai kegiatan, Pak Camat pasti datang. Dan surat undangan pertemuan KTNA selalu diketahui oleh pak Camat".

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) bertugas 7 orang penyuluh pertanian, sehingga dibagi menjadi 7 wilayah binaan. Penentuan wilayah binaan berdasarkan alur sumber/mata air irigasi. Karena seluruhnya ada 16 desa, maka satu orang Penyuluh Pertanian membina dua atau tiga desa. Menurut penyuluh koordinator **Carta Engkus Sudirja**, perhatian pemerintah daerah sangat baik. Para penyuluh pertanian selain mendapat tunjangan fungsional, mendapatkan pula kesejahteraan pegawai, juga pakaian seragam, yaitu pakaian dinas untuk hari senin s/d kamsis, dan pakaian muslimin untuk hari jum'at. Hal ini diperkuat dengan pernyataan



Ketua KTNA Kabupaten Indramayu. H. Sofwan H.

ketua KTNA Kabupaten Indramayu **H. Sofwan Hidayat**, bahwa perhatian Bupati sangat besar pada para petani. Terbukti dengan dikabulkannya permohonan pe-

tani dalam hal pengerukan saluran irigasi sampai saluran ter-tier. Karena umumnya lahan sawah di Indramayu ini adalah tanah irigasi.

Dalam pembuatan program penyuluhan pertanian di BPP, sebelum penulisan program dilakukan beberapa kali pertemuan.

- Pertemuan pertama : Koordinator dengan KCD, Petugas Koperasi Lapangan, KTNA Kecamatan dan penyuluh. Sebagai hasil pertemuan adalah kesepakatan langkah apa yang diperlukan dan menentukan masalah.
- Pertemuan kedua : Pertemuan khusus penyuluh. Dalam pertemuan ini membahas dilakukannya pendataan/survey.
- Pertemuan ketiga : Melakukan pengolahan data hasil dari lapangan.
- Pertemuan keempat : Pertemuan kembali semua peserta pertemuan pertama, dengan melibatkan KTNA desa dan Raksa Bumi.
- Ekspose kepada petugas Kecamatan, petugas desa, kuwu, kontaktani, dan semua peserta pertemuan pertama.

Sehingga program kerja BPP diketahui oleh semua pihak, yang pada akhirnya dijadikan acuan untuk membuat rencana kerja penyuluh.

HARAPAN

Menurut bapak Sumardjo, walaupun sewaktu bangunan masih mengontrak, petani sudah senang karena keinginan mereka tercapai mempunyai tempat



Carta Engkus Sudirjo, Koordinator Penyuluh BPP Sliyeg

untuk belajar dan dapat bimbingan dari penyuluh. Dengan keadaan sekarang, sudah memiliki bangunan sendiri, para petani semakin bersemangat, lebih bersatu dalam memecahkan masalah. Cuma sayangnya belum mempunyai lahan untuk percontohan dan percobaan, karena lahan yang dapat dibeli hanya untuk bangunan BPP. Apabila ada lahan untuk percobaan, para penyuluh akan lebih percaya diri dalam menghadapi petani, karena sudah mengalami sendiri.

Selain itu ada harapan-harapan lain yaitu:

- Mengharapkan para petani Kecamatan Sliyeg mempunyai kemampuan merata dalam hal kepemimpinan dan kemampuan usahatani. Usaha kearah itu sudah dilakukan dengan menggilir tempat pertemuan, yang punya rumah harus berpidato, dan yang memimpin rapat bergantian.

Agar kelompoktani diberi pinjaman oleh pemerintah untuk membeli gabah, dan gabahnya disimpan oleh masing-masing kelompok. Dalam hal ini, kelompok berfungsi sebagai

pembeli gabah petani dan penyimpanan gabah. Tujuannya untuk meningkatkan harga gabah petani, karena kemampuan Dolog hanya 8 % dari produksi petani.

- Fasilitas di BPP lengkap, termasuk ada komputer, sehingga para petani di Kecamatan Sliyeg dapat mengakses internet, sehingga dapat mengembangkan jenis usahatani, dan mengembangkan pemasaran. Mengingat Kecamatan Sliyeg sebagai produsen mangga gedong gincu, komoditas export.

BPP IDEAL

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) adalah lembaga penyuluhan pertanian tingkat usahatani. Lembaga penyuluhan ini merupakan ujung tombak penyuluhan pertanian di pedesaan, sehingga tolok ukur keberhasilannya adalah seberapa jauh diakui, digunakan dan dimanfaatkan oleh petani untuk mengembangkan kegiatannya secara mandiri. BPP harus merupakan basis kegiatan usaha petani, basis kegiatan pertemuan petani, dan basis rencana pengembangan usaha petani. Idealnya BPP dikelola oleh kontaktani, dan peran pemerintah adalah memfasilitasi kegiatan petani tersebut.

Sepertinya keadaan BPP di kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu sudah mendekati ideal. BPP seperti itulah yang diharapkan, bukan semata-mata unit kerja pemerintah untuk memberikan bantuan kepada petani. Semoga kedepan banyak bermunculan BPP mandiri (FS).

PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU PADA ERA OTONOMI DAERAH

Pelaksanaan otonomi daerah mengharuskan daerah untuk mengatur rumah tangganya guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan. Seiring dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, kegiatan Penyuluh Pertanian di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau tetap dipertahankan. Melalui Perda Nomor 01 Tahun 2000 Tentang Struktur Organisasi Tata Laksana Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Lembaga Penyuluhan Pertanian Kabupaten Indragiri Hulu disatukan di bawah naungan. " KANTOR INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN DAN KEHUTANAN (KIPPK).

Beban berat diletakkan di puncak KIPPK. Melalui lembaga ini Pemerintah Daerah Indragiri Hulu berharap Sistem dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian menjadi handal dalam mewujudkan kesejahteraan petani dan keluarganya.

Kondisi Pertanian

Kabupaten Indragiri Hulu dengan luas wilayah 8.122,94 km² mempunyai potensi lahan pertanian seluas 240.599 ha, dengan kemiringan 0-1000m dari permukaan laut.



Ir. Mansur Kepala
KIPPK Kabupaten
Indragiri Hulu

Menurut karakteristik lahan dapat dibagi ke dalam empat golongan yaitu :

1. Lahan datar dengan jenis tanah podsolik merah kuning dengan bahan induk endapan dan alluvial.
2. L a h a n berbukit dengan jenis tanah podsolik merah kuning dengan bahan induk batuan endapan dan batuan beku.
3. Lahan berbukit dengan jenis tanah kompleks podsolik merah kuning, latosol dan litosol dengan bahan induk batu-batuan beku dan metamorf.
4. Dengan Aliran Sungai (DAS) Indragiri, dengan tanah banyak mengandung humus yaitu tanah gambut dengan ketebalan 50-150 cm.

Komoditi yang banyak diusahakan menurut sub sektor adalah Padi, Jagung, Kacang Tanah, Pisang dan Sayur-sayuran (Tanaman Pangan). Kelapa Sawit dan Karet (Perkebunan). Kerbau, Sapi, Kambing dan Ayam buras (Peternakan). Sedangkan perikanan adalah kolam air

tawar dengan komoditas ikan Gurami, Nila, Patin dan Mas.

Komoditi tanaman pangan banyak diusahakan pada DAS Indragiri, karena kesuburan tanahnya relatif baik. Hanya saja daerah tersebut hampir setiap tahun terjadi banjir, maka pertanaman kebanyakan hanya terjadi sekali setahun. Setiap tahun lahan yang dimanfaatkan untuk tanaman pangan ini sekitar 5.871,5 ha.

Pemasaran hasil komoditi ini hanya dalam kabupaten Indragiri Hulu, sebab hasilnyapun baru dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Memang hasil pisang pernah surplus, sehingga sempat di pasarkan ke Batam dan Jakarta. Akan tetapi sejak dua tahun terakhir ini drastis menurun akibat serangan penyakit Layu Fusarium dan Layu Bakteri. Sampai saat ini belum ditemukan cara pengendalian yang efektif untuk kedua jenis penyakit tersebut.

Komoditi perkebunan di kabupaten Indragiri Hulu pada sa'at ini adalah Kelapa Sawit dan Karet. Sebahagian besar Kelapa Sawit didominasi Perkebunan Swasta yang bermitra dengan petani melalui Pola KKPA/Plasma. Sedangkan karet didominasi oleh perkebunan rakyat. Luas perkebunan swasta/KKPA adalah 114,378 ha. Sedangkan perkebunan rakyat seluas 120.349,5 ha.

Untuk sub sektor peternakan dan perikanan di kabupaten Indragiri Hulu belum begitu dominan. Peternakan sapi potong adalah menjadi andalan para

peternak sehubungan dengan banyak tersedia pakan alami disekitar aliran sungai Indragiri.

Kiprah Penyuluhan Pertanian

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya terletak pada kerja keras dalam pembangunan fisik, tetapi jauh lebih penting dari pada itu adalah pengembangan kemampuan petani. Pengembangan ini terutama ditujukan pada penguasaan ilmu dan teknologi (Iptek), kemampuan manajerial, kemampuan berorganisasi dan berbudaya industrial sehingga mampu berorientasi ke arah bisnis secara rasional.

Bertolak dari hal itu maka misi KIPPK kabupaten Indragiri Hulu adalah:

1. Mengembangkan sistem dan kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang produktif, efektif dan efisien.



Drs. H.R. Marjohan Yusuf Sekda Kabupaten Indragiri Hulu Meresmikan LKM Belida di Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat

2. Mengembangkan kualitas ketenagaan Penyuluh Pertanian.
 3. Mengembangkan program Penyuluh Pertanian sesuai dengan kebutuhan lokalita.
 4. Mengembangkan pendekatan metodologi dan model-model Penyuluhan Pertanian Partisipatif.
 5. Mengembangkan kepemimpinan dan keswadayaan petani dan kelompok beserta masyarakat pelaku agribisnis.
 6. Mengembangkan kelembagaan petani menjadi organisasi sosial ekonomi yang tangguh.
 7. Mengembangkan jaringan dan komunikasi dalam sistem dan usaha agribisnis.
- Menuai harapan (tentang pemberdayaan ekonomi kerakyatan)
 - Film slide digital paket teknologi Peternakan,
 - Film slide digital paket teknologi Perikanan,
 - Film slide analog tanaman cabe,
 - Film slide analog tanaman jagung
 - Film slide analog tanaman kacang tanah.

Setiap tahun di lahan KIPPK dan BPP dilaksanakan kaji kerap teknologi pertanian yang dapat memberikan hasil kajian spesifik lokalita. Untuk di tingkat lapangan demplot-demplot penerapan paket teknologi dilaksanakan pada lokasi-lokasi yang potensial.

Melalui tenaga profesional Penyuluh Pertanian yang berjumlah 79 orang (63 PNS dan 16 Honorer) tersebar di 9 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang merupakan instalasi KIPPK pada setiap kecamatan. Sebanyak 341 kelompok tani menjadi binaan para Penyuluh Pertanian.

Atas dukungan dana dari Pemda, operasional penyuluhan pertanian di kabupaten Indragiri Hulu dapat berjalan. Kini KIPPK telah memiliki satu buah mobil unit, satu perangkat peralatan Studio Audio Visual (camera rekam, computer editing, studio rekaman, genset dan proyektor). Dari peralatan tersebut telah diproduksi film penyuluhan pertanian kabupaten Indragiri Hulu, judul :

- Budidaya Ternak Ayam potong,

Dalam upaya mengembangkan kualitas Penyuluh Pertanian dan para Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) pada dua tahun terakhir ini dilaksanakan magang paket teknologi pertanian. Pada tahun 2002 yang lalu dimagangkan ke Balai Penelitian Buah Solok Sumatera Barat dengan materi utama tanaman pisang dan buah-buahan dataran rendah. Sedangkan pada tahun 2003 ini telah pula dimagangkan ke kabupaten Bogor Jawa Barat dengan materi pokok Teknik Pemijatan Mono sex nila Gif, Budidaya Jamur, Budidaya Lidah Buaya, pertanian organik.

Selain dari pada itu untuk memperdalam ilmu dan mengembangkan wawasan, para pelaku pertanian di KIPPK dan setiap BPP disediakan fasilitas perpustakaan. Tidak



Kaji Terap Penggunaan Kaptan terhadap Kacang Tanah di lahan KIPPK Kabupaten Indragiri Hulu

kurang dari 500 judul yang berhubungan dengan pertanian telah disediakan.

Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Sejak tahun 1997, Indonesia diterpa oleh krisis ekonomi yang berakibat pada meningkatnya jumlah penduduk miskin. Di Kabupaten Indragiri Hulu dari penduduk sekitar 329,127 jiwa, penduduk miskin berjumlah 60.000 jiwa. Dari jumlah tersebut 10.650 jiwa (17 %) telah dijangkau oleh KIPPK.

Melalui Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K) telah diberdayakan 252 Kelompok Petani Kecil (KPK). Sampai dengan September 2003 melalui pendanaan APBN dibina 228 KPK dengan akses kredit Rp. 1.506.150.000,-. Nilai pengembalian Rp. 1.068.775,070,- tunggakan 0,7%. Sedangkan melalui dana APBD dibina 24 KPK. Pada tahun 2002 disediakan dana bergulir Rp. 100 juta, seluruhnya telah terserap dengan tunggakan 0%. Pada tahun 2003 meningkat menjadi Rp. 800 juta. Sehingga dalam kurun waktu tiga tahun akan beredar dana APBD untuk pemberdayaan petani kecil sebanyak Rp. 1.100.000.000,-. Berkaitan dengan itu melalui pemberdayaan petani kecil tersebut telah terhimpun dana tabungan KPK senilai Rp 194.948,- Dengan dana tersebut, maka telah berdiri tujuh Lambaga Keuangan Mikro (LKM) kabupaten Indragiri Hulu di tingkat petani kecil.(Mansyur)

PENGENALAN DAN PENGGUNAAN PESTISIDA NABATI

Secara umum pestisida nabati diartikan sebagai suatu pestisida yang bahan dasarnya berasal dari tumbuhan. Pestisida nabati relatif mudah dibuat dengan kemampuan dan pengetahuan terbatas. Oleh karena

terbuat dari bahan alami/nabati, maka jenis pestisida nabati bersifat mudah terurai di alam, sehingga tidak mencemari lingkungan dan relatif aman bagi manusia dan ternak peliharaan karena residunya mudah hilang.

Penggunaan pestisida nabati bukan untuk meninggalkan dan menganggap tabu penggunaan pestisida sintetis, tapi hanya merupakan suatu cara alternatif dengan tujuan agar penggunaan tidak hanya tergantung kepada pestisida sintetis. Tujuan lainnya adalah mengurangi penggunaan pestisida sintetis yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

Secara evolusi, tumbuhan telah mengembangkan bahan kimia sebagai alat pertahanan alami terhadap pengganggunya. Tumbuhan mengandung banyak bahan kimia yang merupakan produksi metabolit sekunder, dan digunakan oleh tumbuhan sebagai alat pertahanan dari serangan organisme pengganggu. Tumbuhan sebenarnya kaya akan bahan bioaktif. Lebih dari 2.400 jenis tumbuhan yang termasuk ke dalam 235 famili dilaporkan mengandung bahan pestisida. Oleh karena itu apabila kita dapat mengolah tumbuhan ini sebagai bahan pestisida, maka akan sangat membantu masyarakat petani kita untuk mengembangkan pengendalian yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumberdaya setempat yang terdapat disekitarnya.

Kendala Penggunaan Pestisida Nabati

Berkaitan dengan beberapa manfaat yang didapatkan dari pestisida nabati, maka sudah selayaknya jika penggunaan jenis pestisida ini harus dimas-

yarakatkan. Namun pengembangan pestisida nabati di Indonesia mengalami beberapa kendala, antara lain :

- (1). Pestisida sintetis tetap lebih disukai dengan alasan mudah didapat, praktis mengaplikasikannya, hasilnya relatif cepat terlihat, tidak perlu membuat sediaan sendiri, tersedia dalam jumlah banyak, dan tidak perlu membudidayakan sendiri tanaman penghasil pestisida.
- (2). Kurangnya rekomendasi atau dorongan dari pengambil kebijaksanaan. Hal ini terlihat dari kurangnya atau tidak adanya penyuluhan dan pengenalan penggunaan pestisida nabati kepada petani atau pengguna.
- (3). Tidak tersedianya bahan secara berkesinambungan dalam jumlah yang memadai saat diperlukan.
- (4). Tingginya frekuensi penggunaan, karena sifatnya yang mudah terurai di alam sehingga memerlukan pengaplikasian yang lebih sering.
- (5). Sulitnya registrasi pestisida nabati, mengingat pada umumnya jenis pestisida ini memiliki bahan aktif yang kompleks dan tidak semua bahan aktif dapat dideteksi .

Pembuatan Pestisida Nabati

Cara pembuatan pestisida nabati dari berbagai jenis tumbuhan tidak dapat dijelaskan secara khusus atau distandarisasi, karena sifatnya tidak berlaku umum. Suatu ramuan pestisida

nabati yang berhasil baik atau bersifat efektif di suatu tempat belum tentu berhasil dengan baik ditempat lainnya, karena ramuan pestisida nabati bersifat khusus lokasi. Salah satu penyebabnya adalah pada tumbuhan yang sama, tetapi jika tumbuh di lingkungan yang berbeda maka kandungan bahan aktifnya pun dapat berbeda pula.

Pembuatan pestisida nabati dibagi menjadi dua cara, yaitu secara sederhana dan secara laboratorium.

Cara sederhana (jangka pendek) dapat dilakukan oleh petani dan penggunaan ekstrak biasanya dilakukan sesegera mungkin setelah pembuatan ekstrak dilakukan.

Cara laboratorium (jangka panjang) biasanya dilakukan oleh tenaga ahli yang sudah terlatih, hasil kemasannya untuk disimpan lama.

Pembuatan pestisida nabati secara sederhana berorientasi kepada penerapan usaha tani berinput rendah, sedangkan pembuatan cara laboratorium berorientasi pada penerapan industri pertanian.

Untuk menghasilkan bahan pestisida nabati dapat dilakukan beberapa teknik berikut:

- (1). Pengggerusan, penumbukan, pembakaran, atau pengepresan untuk menghasilkan produk berupa tepung, abu atau pasta.
- (2). Rendaman untuk produk ekstrak.
- (3). Ekstraksi dengan menggunakan bahan kimia pelarut disertai perlakuan khusus oleh tenaga yang

terampil dan dengan peralatan yang khusus.

Nimba dan Serangga, Efek Biologis

Bahan aktif utama dalam ekstrak nimba ialah Azadirachtin. Cara kerja berbagai ekstrak nimba terhadap jenis-jenis serangga bila terkena bahan aktif Azadirachtin, yaitu :

- (1). Mengganggu atau mencegah perkembangan telur, larva atau pupa.
- (2). Memblokir proses ganti kulit dari larva.
- (3). Mengganggu proses komunikasi seksual dan perkawinan.
- (4). Menolak makan serangga, larva dan dewasa.
- (5). Mencegah serangga betina meletakkan telurnya.
- (6). Membuat serangga dewasa muncul.
- (7). Meracuni larva dan dewasa
- (8). Membuat proses metamorfose kacau pada berbagai tahap
- (9). Mencegah pembentukan kitin.

Pengenalan dan perbanyak Agens Hayati

Agen hayati sebagai agen pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman termasuk ke dalam kelompok Musuh Alami. Musuh Alami sendiri diartikan sebagai organisme hidup yang menjadi musuh OPT. Musuh alami itu bisa berupa parasit (oid), pemangsa (predator) dan penyakit atau patogen yang semuanya itu dapat menyebabkan kematian terhadap hama tanaman. (Santoso)

Untuk mengenang H.Oyon Tahyan, kami sajikan tulisannya yang sudah dimuat pada ekstensia Volume 6 1998.

Peranan KTNA dalam Menggerakkan Pemantapan Kelompoktani Pelaksana Intensifikasi Pertanian

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD'45. Untuk mencapai tujuan tersebut dititik beratkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan, seiring dengan meningkatnya kualitas

sumberdaya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan bidang-bidang pembangunan lainnya.

Sejalan dengan tujuan Pembangunan Nasional tersebut, Pembangunan Pertanian diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani-nelayan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta mengisi dan memperluas pasar, melalui pertanian yang maju, efisien dan tangguh, sehingga makin mampu meningkatkan hasil, mutu dan derajat pengolahan produksi serta menunjang pembangunan daerah.

Usaha-usaha tersebut akan berkembang atau berhasil apabila didukung sepenuhnya oleh peran aktif petani-nelayan sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Kualitas petani-nelayan pada akhirnya akan menentukan keberhasilan pembangunan pertanian, sehingga kunci keberhasilan pembangunan pertanian adalah meningkatnya kemampuan sumberdaya manusia (petani-nelayan) dalam pengelolaan usaha pertanian, yang selalu berorientasi pada agribisnis dan agroindustri.



H. Oyon Tahyan pada PENAS IX di NTB

Sebagai strategi dasar pembangunan pertanian dengan penerapan system agribisnis terpadu yang mampu menghasilkan produk-produk pertanian dan agroindustri yang berdaya saing tinggi di pasar. Penerapan strategi dasar ini menghendaki kesiapan sumberdaya manusia pertanian yang diarahkan tidak saja pada peningkatan kemampuannya dalam usahatani, akan tetapi juga pada kemampuan dalam melaksanakan bisnis di bidang pertanian.

Untuk meningkatkan peran KTNA dalam menunjang pembangunan pertanian pada umumnya, khususnya dalam pemantapan intensifikasi, kita lihat secara menyeluruh dari peranserta KTNA yang disebut dengan SAPTA PERAN KTNA yaitu

1. Pemimpin petani-nelayan/masyarakat pedesaan
2. Penyuluh swakarsa
3. Negosiator
4. Pengurus KUD
5. Pembela dan pelindung hak-hak petani-nelayan
6. Pengelola P4S
7. Pelopor dan pembaharuan pembangunan

Kualitas para kontaktani-nelayan selaku Ketua Kelompok, harus dapat diandalkan untuk mengorganisir anggotanya secara baik dalam melakukan kerjasama dan mitra usaha yang saling menguntungkan dengan lembaga-lembaga perekonomian yang

ada di pedesaan. Hal tersebut jangan hanya dilihat pada lapisan menengah dan atas saja, akan tetapi lapisan bawahpun harus diperhatikan karena tidak sedikit peranannya dalam pembangunan pertanian. Contohnya: Ketua Kelompok Petani-nelayan Kecil yang dipilih secara musyawarah dari dan oleh mereka sendiri mampu menggerakkan anggotanya. Penghasilan mereka meningkat. Hal ini membuktikan kepemimpinannya cukup handal sehingga anggota yang hidup di bawah garis kemiskinan dapat diperbaiki nasibnya.

Untuk meningkatkan kepemimpinannya KTNA maka perlu juga mengikuti palatihan-pelatihan baik yang dilakukan oleh pemerintah, maupun LSM agar berpandangan dan berwawasan yang luas. Yang lebih penting lagi, KTNA jangan menggantungkan diri pada pemerintah saja tapi harus mempunyai prinsip bahwa pemerintah adalah partner/mitra KTNA.

Peranan KTNA sebagai penyuluh swakarsa merupakan kewajiban untuk menyebarluaskan kewajiban untuk teknologi-teknologi baru kepada petani-nelayan. Kerjasama yang berazaskan kemitraan dengan para penyuluh pertanian perlu terus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Disamping itu KTNA harus dapat meyakinkan kepada anggota/masyarakat petani-nelayan akan "Budaya

Berencana” yang akhir-akhir ini mulai ditinggalkan petani dalam merencanakan usahanya dengan seksama.

Peranan KTNA sebagai Negosiator sangat dibutuhkan untuk menjembatani antar pengusaha dan petani dalam rangka melakukan kerjasama/kemitraan. Dalam hal kemitraan ini pihak petani sering kali di pihak yang lemah. Sehingga mudah sekali dirugikan. Memang akhir-akhir ini banyak sekali dibicarakan mengenai kemitraan.

Padahal pengertian kemitraan: *Kemitraan adalah suatu pola kerja sama usaha antara petani-nelayan dengan perusahaan/pengusaha (mitra usaha) disertai pembinaan dan pengembangan berkelanjutan oleh mitra usaha dengan memperhatikan prinsip saling mengisi, saling memperkuat, saling menguntungkan dan saling ketergantungan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul.*

Disini peranan KTNA sangat besar, bagaimana agar petani-nelayan dapat bermitra dengan perusahaan. Karena usaha kemitraan dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah. Dengan pengembangan kerjasama (kemitraan) akan menjamin terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan dan keterpaduan dengan azas operasional sebagai berikut :

Kedudukan antara petani-nelayan dengan perusahaan sama.

- Saling percaya mempercayai
- Saling menguntungkan

- Saling memerlukan
- Saling membina dan mendidik
- Saling memegang/melaksanakan etika-etika bisnis.

Sehubungan dengan hal tersebut peranan KTNA sebagai Negosiator dapat mengadakan pendekatan yang dianggap strategis, antara lain pengembangan agribisnis melalui pendidikan pesantren, pengembangan inkubator agribisnis didaerah sentra pengembangan agribisnis (P4S), menumbuh kembangkan forum-forum komunikasi agribisnis di pedesaan.

Peranan KTNA sebagai pengurus KUD

Menghimbau dan berharap semua KTNA menjadi pengurus KUD dan semua petani-nelayan merupakan anggota KUD. KTNA sebagai pengurus KUD dapat membantu atau mempermudah petani-nelayan untuk mendapatkan Kredit Usaha Tani (KUT) sebagai usaha pertanian, disamping itu juga mempermudah petani- nelayan



Magang Petani pada P4S Lebah Madu

mendapatkan sarana produksi, misalnya pupuk, obat-obatan, pestisida, dll, serta KUD dapat menampung hasil pertanian dengan harga standar sehingga tidak merugikan petani-nelayan. Peranan KTNA sebagai pembela dan pelindung hak-hak petani-nelayan dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan Mimbar Sarasehan, baik tingkat daerah maupun pusat, Temu Usaha dan kegiatan-kegiatan lain berkaitan dengan petani-nelayan.

Peranan KTNA sebagai pengelola P4S

Mengingat kebutuhan pelatihan dan pemagangan pada saat ini dan masa mendatang sangat diperlukan untuk meningkatkan sumberdaya manusia, maka dengan keikhlasan dan kesadaran ingin membantu sesama petani nelayan dengan mendirikan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S). P4S itu dibentuk didirikan, dikelola dan dimiliki oleh petani, bukan didirikan pemerintah. Pemerintah hanya memberikan bimbingan agar pengelolaannya, pertumbuhannya serta perkembangannya baik. Dengan tumbuhnya P4S diberbagai daerah, usaha petani-nelayan beserta masyarakat sekitarnya akan mampu memanfaatkan sumberdaya pertanian dan pedesaan secara optimal, kemampuan mengembangkan usaha, khususnya usahatani yang berorientasi

agribisnis dan berwawasan lingkungan, serta mampu mengembangkan usaha non pertanian, misalnya industri kecil yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

Dan peranan KTNA yang terakhir adalah sebagai pelopor dan pembaharu pembangunan. Keberhasilan pembangunan pertanian yang telah dicapai dewasa ini, tidak terlepas dari peranan kontaktani-nelayan dalam membina kemampuan, mendorong dan meyakinkan para petani-nelayan dalam meningkatkan produksi pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa kontaktani-nelayan mampu melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan usahatani melalui kerjasama antara mereka sendiri. Kesuksesan kontaktani-nelayan dalam mengalihkan teknologi usahatani yang dikuasanya kepada petani lainnya, bukan saja dapat menumbuhkan inspirasi dan inisiatip para kelompok-tani-nelayan, tetapi lebih dari itu, mereka berupaya untuk lebih meningkatkan kegiatan proses belajar-mengajar yang lebih sistimatis dan terstruktur. Untuk itu kontaktani-nelayan Indonesia membagi pengalaman kepada petani-nelayan dari negara Afrika dan negara Anggota GNB. Dari uraian tersebut diatas jelas peranan kontaktani-nelayan sangat besar, baik disadari maupun tidak. Tanpa keikutsertaan petani-nelayan/kontaktani-nelayan, pembangunan pertanian tidak berhasil dengan memuaskan.

REKOMENDASI KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN NASIONAL TENTANG RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENYULUHAN PERTANIAN

Dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, dirasakan sangat diperlukan Undang-Undang Penyuluhan Pertanian. Karena itu Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN) merumuskan suatu rekomendasi tentang Rancangan Undang-Undang Penyuluhan Pertanian.



Usaha agribisnis pembuatan dendeng ikan

1. Pembangunan Pertanian di Indonesia selama kurun waktu 57 tahun setelah merdeka menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan, namun demikian fakta menunjukkan bahwa tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani-nelayan masih jauh dari harapan. Disamping itu kondisi ketahanan pangan nasional dirasakan masih rapuh. Menyikapi hal tersebut diperlukan adanya perbaikan sistem pendidikan yang memberdayakan petani-nelayan secara berkelanjutan dalam bentuk sistem penyuluhan pertanian sehingga petani-nelayan dapat memperbaiki kesejahteraannya sendiri dan melaksanakan usaha agribisnis yang menguntungkan bagi mereka.
2. Perkembangan dunia penyuluhan pertanian di Indonesia dewasa ini sedang mengalami terpaan gelombang ketidakpastian bahkan berada pada fase kritikal. Apabila kondisi tersebut tidak mendapatkan perhatian atau langkah penanggulangannya tidak tepat maka akan berakibat fatal dan akan sulit untuk bangkit kembali. Salah satu upaya kebijakan yang diperlukan untuk memperbaiki sistem penyuluhan pertanian yang ada sekarang adalah adanya Undang-Undang Penyuluhan Pertanian.
3. Undang-Undang Penyuluhan Pertanian merupakan produk hukum yang sangat dinanti-nanti kela-

hirannya baik oleh petani-nelayan, penyuluh pertanian maupun dunia usaha agribisnis. Lahirnya Undang-Undang Penyuluhan Pertanian mempunyai landasan hukum kuat yaitu UUD 1945 yang isinya antara lain bahwa pemerintah berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Artinya, masyarakat petani-nelayan juga mempunyai hak yang sama untuk hidup cerdas, dan hal tersebut menjadi kewajiban pemerintah dalam mencerdaskan petani-nelayan melalui penyuluhan pertanian (pendidikan non formal).

4. Penyuluhan pertanian merupakan suatu sistem dan lembaga yang diperlukan oleh petani-nelayan untuk terjadinya proses belajar dan mengajar dalam mencerdaskan kehidupan mereka. Kelembagaan penyuluhan pertanian juga merupakan salah satu lembaga esensial yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat pertanian terutama dalam



Mencerdaskan petani-nelayan melalui penyuluhan pertanian

menciptakan dan meraih peluang serta mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dihadapi petani-nelayan dalam membangun dan menjalankan sistem dan usaha agribisnis.

5. Keberadaan kelembagaan penyuluhan pertanian di pedesaan merupakan sumber pembangkit dan pendorong semangat petani-nelayan dan penyuluh pertanian, serta dapat menumbuhkan kepercayaan diri petani-nelayan, pelaku agribisnis lainnya dan penyuluh. Kelembagaan penyuluhan pertanian juga merupakan tempat penyuluh berkreasi, berinovasi, berorganisasi, dan sebagai sumber informasi dalam pengembangan sistem dan usaha agribisnis. Melalui lembaga penyuluhan ini akan tumbuh dan berkembangnya kemandirian petani-nelayan sebagai subyek yang tangguh dalam pembangunan pertanian dan pedesaan.
6. Substansi Undang-Undang Penyuluhan Pertanian sebaiknya hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok/ umum saja. Pengaturan lebih lanjut dapat dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri yang terkait dalam pengaturan penyuluhan pertanian.
7. Isi dan RUU Penyuluhan Pertanian disarankan terdiri dari :
 - a. Konsiderans yang berisi pertimbangan tentang pentingnya penyuluhan pertanian, yang

- penyelenggaraannya merupakan kewajiban pemerintah, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyuluhan pertanian.
- b. Ketentuan Umum

Pengertian/Peristilahan (Glossary) yang akan dimuat dalam Rancangan Undang-Undang
 - c. Falsafah, Landasan, Asas, Visi, Tujuan, Kelompok Sasaran (Khalayak Pengguna) dan Ruang Lingkup Penyuluhan Pertanian
 - d. Petani-nelayan dan pelaku agribisnis lainnya serta kelembagaannya sebagai subyek pembangunan perlu mendapat dukungan dan pemberdayaan melalui penyuluhan pertanian
 - e. Posisi penyuluh pertanian sebagai penggerak pembangunan sistem dan usaha agribisnis
 - f. Sistem dan kelembagaan penyuluhan pertanian meliputi tingkat nasional sampai tingkat operasional.
 - g. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian :
 - koordinator penyelenggaraan penyuluhan pertanian
 - pengelolaan/manajemen penyuluhan pertanian
 - kewenangan dan tanggungjawab pusat dan daerah
 - pengangkatan dan pemberhentian penyuluh pertanian
 - h. Dukungan terhadap penyuluhan pertanian terdiri dari :
 - dukungan politik berupa kebijakan peraturan dan perundangan
 - dukungan IPTEK dan informasi
 - dukungan pendanaan
 - Dukungan kerjasama dari Perguruan Tinggi, lembaga penelitian dan instansi/ lembaga terkait
 - dukungan pengembangan SDM : Lembaga Diklat
 - i. Pengawasan untuk menjamin terselenggaranya penyuluhan pertanian
 - j. Panca etika penyuluhan pertanian
 - k. Ketentuan Peralihan
 - l. Ketentuan Penutup.
8. Didalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Penyuluhan Pertanian secara lengkap disarankan untuk melibatkan/menampung aspirasi atau masukan-masukan terutama dari para penyuluh pertanian, KTNA, para pakar di bidang penyuluhan pertanian serta instansi/lembaga lain yang terkait secara langsung. Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN) menyambut baik dan mendukung sepenuhnya adanya semangat dari semua pihak terutama

dari Pemerintah (Deptan) dalam melahirkan Rancangan Undang-Undang Penyuluhan Pertanian, karena ide penyusunan Rancangan Undang-Undang Penyuluhan Pertanian sudah dirintis sejak tahun 1983 (tepatnya

tanggal 10 Pebruari 1983) Artinya rintisan tersebut sudah berjalan 20 tahun, namun selalu kandas di tengah jalan. Mudah- mudahan bangkitnya semangat di tahun 2003 tidak putus di tengah jalan. (Mulyono)

STATUTA KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN NASIONAL (KPPN)

Bahwa penyuluhan pertanian yang diartikan sebagai sistem pendidikan non formal diselenggarakan dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan petani beserta keluarganya agar mereka mampu, sanggup berswadaya memperbaiki/meningkatkan kesejahteraan sendiri serta masyarakatnya. Untuk menuju masyarakat yang sejahtera

tersebut maka penyelenggaraan penyuluhan pertanian difokuskan pada pengembangan masyarakat petani agar usahanya berorientasi agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan serta terdesentralisasi.

Untuk terwujudnya penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien perlu adanya kelembagaan yang independen sebagai mitra kerja pemerintah dalam merumuskan

kebijakan penyuluhan pertanian. Kelembagaan tersebut pada tingkat nasional adalah Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN); pada tingkat Propinsi adalah Komisi Penyuluhan Pertanian Propinsi (KPPP); pada tingkat Kabupaten/Kota adalah Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota (KPPK).



Penyelenggaraan Penyuluhan pertanian difokuskan pada pengembangan masyarakat petani

NAMA

Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional atau disingkat KPPN, adalah kelembagaan independen yang dibentuk oleh Menteri Pertanian

ORGANISASI

KPPN terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota

TUJUAN

Memberi masukan kepada Pemerintah tentang segala sesuatu untuk kelancaran pelaksanaan dan pengembangan fungsi penyuluhan pertanian

STATUS

Sebagai mitra kerja Menteri Pertanian yang independen, untuk memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan penyuluhan pertanian

KEANGGOTAAN

1. Jumlah anggota : 13 orang
2. Yang dapat menjadi anggota KPPN adalah para pakar dan atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian di bidang penyuluhan pertanian atau pembangunan pedesaan, dari unsur –unsur :
 - Dosen Perguruan Tinggi;
 - Anggota LSM/Organisasi Profesi Pertanian
 - Petani/kontaktan;

- Penyuluh Pertanian
- Peneliti Pertanian
- Swasta/usahawan di bidang pertanian
- Pejabat Departemen Pertanian
- Pejabat Departemen Dalam Negeri
- Pakar Mandiri

3. Masa Jabatan

- 5 (lima) tahun dan dimungkinkan ada pergantian anggota antar waktu tiap tahun;
- Setelah masa jabatan berakhir bisa dipilih kembali. Untuk menjamin keberlanjutan program kerja KPPN, sebagian anggota lama dipertahankan.

4. Struktur

- KPPN dipimpin oleh seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris;
- Semua anggota KPPN adalah anggota penuh yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

TUGAS

KPPN mempunyai tugas :

1. Memberikan saran/bahan pertimbangan kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

2. Memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitasi Pemerintah untuk mempercepat kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola penyuluhan pertanian di daerah sesuai dengan kewenangan otonomi daerah dan kebijaksanaan pemerintah.
3. Memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan penguatan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, program dan pembiayaan penyuluhan pertanian di daerah, khususnya di tingkat kabupaten/kota.
4. Memberikan saran pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian

TANGGUNG JAWAB

KPPN bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian

WEWENANG

KPPN mempunyai wewenang untuk:

1. Menyelenggarakan rapat-rapat pertemuan secara mandiri.
2. Menanggapi secara proaktif berbagai permasalahan yang berkembang dalam penyelenggaraan penyuluhan Pertanian
3. Mendapatkan data dan informasi dari daerah sebagai bahan untuk

- perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
4. Memberikan informasi mengenai kebijaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian kepada daerah, apabila diperlukan.
5. Mengusulkan personalia anggota KPPN untuk ditetapkan oleh Menteri Pertanian
6. Mengundang narasumber dari berbagai unsur terkait dan aparat lingkup Departemen Pertanian, terutama dalam rapat-rapat KPPN.

DUKUNGAN FASILITAS

Dalam menjalankan tugasnya, KPPN difasilitasi dengan :

1. Kesekretariatan yang memiliki Tim Perumus;
2. Ruang dan fasilitas kerja
3. Biaya – biaya kegiatan KPPN yang dibebankan pada Anggaran Badan Pengembangan SDM Pertanian. Dana dari sumber lain dimungkinkan selama tidak mengikat;
4. Insentif bagi anggota KPPN.

TATA KERJA

1. Tugas dan Fungsi Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.
 - a. Tugas Ketua
 - Penanggung jawab seluruh kegiatan KPPN
 - Memimpin rapat/pertemuan;

- Mengarahkan kegiatan
 - Mewakili KPPN dalam hubungan dengan pihak luar
- b. Tugas Wakil Ketua
- Menggantikan tugas dan fungsi Ketua, apabila Ketua berhalangan
- c. Tugas Sekretaris
- Mengurus kegiatan administrasi KPPN;
 - Menjadi penghubung antara KPPN dengan Badan Pengembangan SDM Pertanian/Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian;
 - Mengurus administrasi keuangan;
 - Mewakili KPPN dalam hubungan dengan pihak luar
2. Rapat/Pertemuan
- a. Jenis Rapat
- Rapat pleno;
 - Rapat khusus
 - Rapat Tim Kerja
3. Frekuensi Rapat
- a. Rapat Pleno diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
- b. Rapat Khusus diselenggarakan dengan mengundang pihak-pihak terkait apabila ada keperluan atau masalah yang mendesak;
- c. Rapat Tim Kerja diselenggarakan sesuai keperluan
4. Prosedur Rapat
- a. Rapat dapat diselenggarakan dalam 1 (satu) hari atau beberapa hari berturut-turut sesuai keperluan;
- b. Rapat Pleno dan Rapat Khusus dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua apabila Ketua berhalangan;
- c. Apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, Rapat Pleno dan Rapat Khusus dipimpin oleh Sekretaris;
- d. Rapat dinyatakan batal apabila tidak ada unsur pimpinan;
- e. Rapat Tim Kerja dipimpin oleh salah seorang anggota yang dipilih oleh Tim
5. Qorum dan Pengambilan Keputusan
- a. Rapat Pleno dan Rapat Khusus dinyatakan memenuhi qorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya 8 (delapan) orang anggota KPPN;
- b. Pada dasarnya keputusan KPPN diambil secara musyawarah dan mufakat. Apabila tidak memungkinkan, keputusan dinyatakan sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 50 % dari yang hadir + 1 (satu) orang.

6. Tim Kerja
 - a. Tim Kerja dibentuk berdasarkan kesepakatan Rapat Pleno dan bertanggung jawab kepada Rapat Pleno
 - b. Tim Kerja diberikan tugas khusus untuk membantu tugas-tugas KPPN;
 - c. Tim Kerja dapat terdiri dari anggota KPPN dan atau pihak luar sesuai kebutuhan;
 - d. Masa tugas Tim Kerja ditentukan oleh Rapat Pleno;
 - e. Tim Kerja melaporkan hasil kerjanya secara tertulis dalam Rapat Pleno.
7. Narasumber
Rapat Pleno dan Rapat Khusus dapat mengundang narasumber yang mempunyai informasi atau keahlian yang diperlukan
8. Kunjungan Kerja KPPN
 - a. KPPN dapat menetapkan sendiri rencana kunjungan kerja ke daerah sesuai kebutuhan, baik dengan biaya yang tersedia maupun kerjasama dengan pihak lain;
 - b. Jumlah peserta dan obyek kunjungan kerja ditetapkan dalam Rapat Pleno;
 - c. Untuk setiap kunjungan kerja dibuat laporan tertulis
9. Pelaporan
 - a. KPPN wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun
 - b. KPPN membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian;
 - c. KPPN dapat membuat laporan khusus, apabila diperlukan atau diminta oleh Menteri Pertanian atau Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian
10. Kesekretariatan
 - a. KPPN dibantu oleh Tim Sekretariat yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian
 - b. Tim Sekretariat terdiri dari :
 - 1). Panitera;
 - 2). Tim Perumus;
 - c. Panitera mengurus keperluan ketatausahaan KPPN dan membantu administrasi rapat-rapat KPPN yang dikordinasikan oleh Sekretaris KPPN;
 - d. Tim Perumus membantu Sekretaris KPPN dalam

- perumusan hasil-hasil rapat KPPN;
- e. Biaya kesekretariatan dibebankan pada anggaran Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian.
11. Pendanaan
- a. Biaya-biaya kegiatan KPPN dibebankan pada anggaran Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian;
 - b. KPPN merencanakan kebutuhan anggaran tahunan yang disampaikan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian melalui Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian;
 - c. Penggunaan anggaran ditetapkan oleh Rapat Pleno KPPN;
 - d. Pengusulan penggunaan anggaran untuk setiap kegiatan harus diketahui oleh Ketua KPPN;
 - e. Administrasi keuangan KPPN dilaksanakan oleh Sekretaris KPPN;
 - f. Laporan pertanggung jawaban keuangan tahunan disiapkan oleh Sekretaris KPPN dan ditandatangani oleh Ketua KPPN;
 - g. Dana dari sumber lain dimungkinkan selama tidak mengikat dan digunakan sesuai dengan kesepakatan pihak pemberi dana. Dana dari sumber lain diinformasikan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian c.q. Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian

PENUTUP

1. Statuta KPPN disusun dan disepakati oleh Rapat Pleno KPPN setelah adanya Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 219/Kpts/Kp.150/4/2003 tentang KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN NASIONAL (KPPN).
 2. Statuta Komisi Penyuluhan Pertanian Propinsi (KPPP) dan Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota (KPPK) disarankan mengacu pada Pedoman Pembentukan KPPP dan KPPK sebagaimana terlampir pada Satuta KPPN.
- Ketetapan KPPN ini ditetapkan di Ciawi, Bogor pada tanggal 14 Juni 2003, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KPPN. (Mulyono)

PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN PROPINSI (KPPP) DAN KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN/KOTA (KPPK)

Pedoman ini dibuat merupakan kelengkapan (lampiran) STATUTA Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN).

Tujuannya, untuk konsistensi dan kemudahan pembentukan KPPP di Propinsi dan KPPK di Kabupaten/kota, berikut adalah bahan pertimbangan untuk penyusunan pedoman pembentukan KPPP dan KPPK.

KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN PROPINSI (KPPP)

NAMA

Komisi Penyuluhan Pertanian Propinsi atau disingkat KPPP, adalah kelembagaan independen yang dibentuk oleh Gubernur.

ORGANISASI

KPPP terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota

TUJUAN

Memberi masukan kepada Pemerintah Propinsi tentang segala sesuatu untuk kelancaran pelaksanaan dan pengembangan fungsi penyuluhan pertanian

STATUS

Sebagai mitra kerja Gubernur yang independen, untuk memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan penyuluhan pertanian

KEANGGOTAAN

1. Jumlah anggota : 7 orang
2. Yang dapat menjadi anggota KPPP adalah para pakar dan atau praktisi yang mempunyai keahlian dan atau pengalaman serta kepedulian di bidang penyuluhan pertanian atau pembangunan pedesaan, dari unsur-unsur.
 - Dosen Perguruan Tinggi/ Peneliti Pertanian;
 - Petani/kontaktani; Swasta/ usahawan di bidang pertanian
 - Pejabat Pemerintah
3. Masa Jabatan
 - 5 (lima) tahun dan dimungkinkan ada pergantian anggota antar waktu tiap tahun;
 - Setelah masa jabatan berakhir bisa dipilih kembali. Untuk menjamin keberlanjutan program kerja KPPP, sebagian anggota lama tetap dipertahankan.

4. Struktur
 - a. KPPP dipimpin oleh seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris;
 - b. Semua anggota KPPP adalah anggota penuh yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

TUGAS

KPPP mempunyai tugas :

1. Memberikan rekomendasi/bahan pertimbangan kepada Gubernur terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian propinsi.
2. Memberikan rekomendasi/bahan pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitasi Pemerintah Propinsi untuk mempercepat kemampuan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola penyuluhan pertanian di daerah sesuai dengan kewenangan otonomi daerah dan kebijaksanaan pemerintah.
3. Memberikan rekomendasi/bahan pertimbangan yang berkaitan dengan penguatan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, program dan pembiayaan penyuluhan pertanian di propinsi dan kabupaten/kota.

4. Memberikan rekomendasi/bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah dan pengembangan kerjasama dalam pelaksanaan operasional penyuluhan pertanian di lapangan.

TANGGUNG JAWAB

KPPP bertanggung jawab kepada Gubernur

WEWENANG

KPPP mempunyai wewenang untuk:

1. Menyelenggarakan rapat-rapat pertemuan secara mandiri.
2. Menanggapi secara proaktif berbagai permasalahan yang berkembang dalam penyelenggaraan penyuluhan Pertanian
3. Mendapatkan data dan informasi dari propinsi dan kabupaten/kota sebagai bahan untuk perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian propinsi.
4. Memberikan informasi mengenai kebijaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian (nasional dan propinsi) kepada kabupaten/kota, apabila diperlukan.
5. Mengusulkan personalia anggota KPPP untuk ditetapkan oleh Gubernur
6. Mengundang narasumber dari berbagai unsur terkait dan aparat lingkup pertanian, terutama dalam rapat-rapat KPPP.

DUKUNGAN FASILITAS

Dalam menjalankan tugasnya, KPPP difasilitasi dengan :

1. Kesekretariatan yang memiliki Tim Perumus;
2. Ruang dan fasilitas kerja
3. Biaya – biaya kegiatan KPPP yang dibebankan pada Pemerintah Propinsi. Dana dari sumber lain dimungkinkan selama tidak mengikat;
4. Insentif bagi anggota KPPP.

KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN/KOTA (KPPK)

NAMA

Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota atau disingkat KPPK, adalah kelembagaan independen yang dibentuk oleh Bupati/Walikota

ORGANISASI

KPPK terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota

TUJUAN

Memberi masukan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tentang segala sesuatu untuk kelancaran pelaksanaan dan pengembangan fungsi penyuluhan pertanian

STATUS

Sebagai mitra kerja Bupati/Walikota yang independen, untuk

memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan penyuluhan pertanian

KEANGGOTAAN

1. Jumlah anggota : 9 orang
2. Yang dapat menjadi anggota KPPK adalah para pakar dan atau praktisi yang mempunyai keahlian dan atau pengalaman serta kepedulian di bidang penyuluhan pertanian atau pembangunan pedesaan, dari unsur –unsur.
 - Dosen Perguruan Tinggi/ Peneliti Pertanian;
 - Anggota LSM/Organisasi Profesi Pertanian
 - Petani/kontaktan;
 - Penyuluh Pertanian
 - Swasta/usahawan di bidang pertanian
 - Pejabat Pemerintah
3. Masa Jabatan
 - 5 (lima) tahun dan dimungkinkan ada pergantian anggota antar waktu tiap tahun;
 - Setelah masa jabatan berakhir bisa dipilih kembali. Untuk menjamin keberlanjutan program kerja KPPK, sebagian anggota lama tetap dipertahankan.
4. Struktur
 - KPPK dipimpin oleh seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris;

- Semua anggota KPPK adalah anggota penuh yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

TUGAS

KPPK mempunyai tugas :

1. Memberikan rekomendasi/bahan pertimbangan kepada Bupati/Walikota terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian Bupati/Walikota
2. Memberikan rekomendasi/bahan pertimbangan yang berkaitan dengan penguatan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, program dan pembiayaan penyuluhan kabupaten/kota.
3. Memberikan rekomendasi/bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian kabupaten/kota
4. Memberikan rekomendasi/bahan pertimbangan untuk mengembangkan kerjasama dalam pelaksanaan operasionalisasi penyuluhan pertanian di lapangan.

TANGGUNG JAWAB

KPPK bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

WEWENANG

KPPK mempunyai wewenang untuk:

1. Menyelenggarakan rapat-rapat pertemuan secara mandiri.
2. Menanggapi secara proaktif berbagai permasalahan yang berkembang dalam penyelenggaraan penyuluhan Pertanian kabupaten/kota
3. Mendapatkan data dan informasi dari berbagai instansi terkait lingkup pertanian dan dari lapangan sebagai bahan untuk perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian kabupaten/kota.
4. Memberikan informasi mengenai kebijaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian (nasional, propinsi dan kabupaten/kota) kepada berbagai pihak, apabila diperlukan.
5. Mengusulkan personalia anggota KPPK untuk ditetapkan oleh Bupati/Walikota
6. Mengundang narasumber dari berbagai unsur terkait dan aparat lingkup pertanian, terutama dalam rapat-rapat KPPK.

DUKUNGAN FASILITAS

Dalam menjalankan tugasnya, KPPK difasilitasi dengan :

1. Kesekretariatan yang memiliki Tim Perumus;
2. Ruang dan fasilitas kerja
3. Biaya – biaya kegiatan KPPK yang dibebankan pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Dana dari sumber lain dimungkinkan selama tidak mengikat;
4. Insentif bagi anggota KPPK. (Mulyono)

RAMUAN PESTISIDA ALAMI

Dengan menurunnya nilai rupiah terhadap nilai dolar Amerika, maka harga pestisida menjadi cukup mahal bagi petani. Padahal petani sangat memerlukan untuk meningkatkan produksi usahatani. Karena itulah maka para penyuluh pertanian dan para petani berusaha memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan bahan-bahan alami yang ada disekitarnya. Salah satunya adalah penyuluh pertanian yang bertugas di Kabupaten Indramayu, Nani Sumarni meracik suatu ramuan pestisida nabati yang biasa digunakannya. Berhubung Kabupaten Indramayu merupakan penghasil terasi, maka salah satu bahan ramuannya menggunakan terasi.

Ramuan Pestisida Nabati ini merupakan ramuan alami, yang dibuat



Nani Sumarni, penyuluh di Kabupaten Indramayu

sederhana, tidak dibuat secara laboratorium. Sehingga para petani dapat membuat sendiri ramuan tersebut. Ramuan ini dapat digunakan untuk mengendalikan hama secara umum.

Ada dua jenis ramuan, yaitu :

1. Ramuan tanpa terasi
 - a. Bahan

Daun nimba.....	4 kg
Lengkuas.....	3 kg
Serai.....	3 kg
Deterjen.....	10 gr
Air.....	10 liter
 - b. Cara membuat

Daun nimba, lengkuas dan serai ditumbuk

Seluruh bahan diaduk rata dengan air 10 liter lalu direndam selama 24 jam (sehari semalam)

Keesokan harinya larutan disaring dengan kain halus

Larutan hasil penyaringan diencerkan kembali dengan air 30 liter. Dapat digunakan untuk lahan seluas 0,5 Ha.
 - c. Cara pemakaian

Cara pemakaian larutan ini dengan disemprotkan pada tanaman secara merata

2. Ramuan Alami Menggunakan Terasi
 - a. Bahan

Gadung.....	2 kg
Tembakau.....	1 kg
Terasi.....	2 ons
Jeringo.....	¼ kg

Minyak kelapa.....1 sd. mkn

b. Cara membuat

- Gadung diparut, lalu disaring. Tembakau, jeri-ngo ditumbuk/dihaluskan, lalu ditaruh dalam suatu wadah, semua bahan tersebut direndam dalam air panas 3 liter.
- Terasi direndam air panas 1 liter
- Keempat bahan dimasukkan kedalam ember plastik, diaduk sampai merata, lalu direndam selama 24 jam.

Semakin lama perendaman, semakin baik hasilnya

- Lakukan penyaringan sambil diaduk
 - Hasil saringan siap untuk disemprotkan .
- c. Dosis pemakaian
- Campurkan satu gelas ramuan alami dengan 10 liter air atau dua gelas ramuan alami dengan 17 – 17 liter air
 - Penyemprotan dilakukan dua kali seminggu bila ada serangan hama penyakit. (FS)

PENGKATUPAN KEMBALI PANILI PECAH DALAM PROSESING ALAMI

Komoditas tanaman Panili di Indonesia yang dibudidayakan petani seperti di Toraja, Lombok, Flores dan sebagian daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, potensinya belum dikembangkan secara maksimal. Kecocokan kondisi spesifik lokasi setempat dan didukung pemeliharaan intensif serta penyeleksian buah panili secara ketat menuju sistem penanganan pasca panen memenuhi standar pasar. Kini panili di Bali Barat menjadi produk bernilai ekspor. Salah satu kunci keberhasilan tersebut adalah merakit cara pengkatupan kembali panili pecah dalam prosesing alami.

Latar Belakang

- ❖ Masalah rendahnya mutu karena hasil buah Panili di tingkat petani umumnya kurang seragam dalam tingkat kematangan
- ❖ Buah Panili tua hampir 10 % pecah, dan petani kurang mengetahui cara menangani dan memanfaatkan.
- ❖ Panili pecah justru mendatangkan nilai rupiah lebih besar karena dari kadar panili dan oilnya yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak pecah. Panili pecah bila diproses harganya lebih tinggi.

Prosesing

Pengkatupan kembali merupakan inovasi baru dalam prosesing Panili secara alami. Cara ini dibakukan setelah dilakukan serangkaian kaji lapang, dengan proses tahapan perlakuan sebagai berikut :

1. Pengikatan dalam satu genggam tangan

Panili pecah dikatupkan satu persatu untuk mengembalikan yang robek pada posisi semula. Ikatan sekian genggam dimasukkan ke dalam plastik.

2. Penjemuran plastik berisi Panili

Plastik berisi ikatan Panili pecah dijemur sehingga terjadi fermentasi di dalam plastik ditandai timbulnya air keringat Panili tersebut. Air tersebut dikumpulkan sebagai obat bagi Panili yang kena jamur saat pengeringan maupun penyimpanan : Selama penjemuran (2-3 hari) plastik dibolak balik hingga seluruh Panili berwarna coklat kemerahan.

3. Penjemuran biasa

Setelah Panili berwarna coklat kemerahan, maka plastik dibuka, kemudian Panili dikeluarkan dan dijemur seperti biasa dengan alas (kain yang menyerap keringat) sehingga air Panili dapat terserap oleh kain. Penjemuran diatur sejajar,

dimana bagian yang pecah ditutup kain agar yang robek tidak keduluan kering ("Poleng"), tidak beda warna kering merah-hitam. Pengeringan ini selama 7 (tujuh) hari.

4. Penyimpanan

Setelah Panili kering rata dan berwarna hitam, maka harus segera dimasukkan kedalam peti pengeraman agar aroma dan minyak/oilnya tidak hilang. Setiap 2 minggu sekali diperiksa dan jika ada yang kena jamur segera diobati dengan minyak keringat panili yang terkumpul dari hasil penjemuran panili dalam plastik tersebut diatas.

Menghasilkan Nilai Tambah

Prinsip seleksi ketat terhadap Panili yang akan diekspor ternyata telah mendidik petani menjadi terbiasa mempertahankan kualitas, sedangkan inovasi pengkatupan kembali panili pecah telah menghasilkan nilai tambah yang sangat menguntungkan. Sekarang petani setempat mulai sadar dan bisa menikmati harga yang layak. Musim panen sudah mulai hampir seragam. Dan masa prosesing berlangsung sampai dengan bulan Agustus (sesuai kapasitas prosesing). Penyediaan bahan baku berupa buah Panili tua dilakukan dengan membeli panili basah hasil dari petani lain. (Santoso)

BIO NUTRIEN ORGANIK AKRAB LINGKUNGAN

Sebagai salah seorang KTNA Kabupaten Bandung KH. Fuad Affandi yang lebih dikenal sebagai Pemimpin Pondok Pesantren Al-Iltifaq di Kecamatan Ciwidey telah berhasil mengembangkan suatu sistem pendidikan berorientasi agribisnis. Para santri disamping kewajiban belajar sehari-hari juga dilibatkan langsung dalam aktivitas pertanian dengan mendapatkan imbalan. Beberapa alumni santri diketahui telah berhasil juga di bidang agribisnis di tempat lain. Para santri di pondok ini meneruskan hasil bimbingan itu kepada masyarakat tani sekitarnya dalam wadah belajar kelompok tani. Lahan usahatani Pesantren luasnya 17 hektar terletak di ketinggian 1400 meter dari permukaan laut dan berjarak 37 Km Selatan Kota Bandung dimana usahatani sayuran sangat baik untuk dikembangkan dengan perlakuan bibit berkualitas dan pupuk yang memadai. Dari latar belakang potensi dan tantangan itulah kiranya menjadi pendorong semangat KH Fuad Affandi untuk membuat pupuk penyubur tanaman yang efektif, serta ramah lingkungan. Timbulnya dugaan "meningkatnya jumlah bakteri yang terkandung dalam air ludah manusia"

khususnya saat bangun tidur di pagi hari merupakan awal gagasan membuat pupuk organik melalui serangkaian percobaan/penelitian yang telah dilakukan bersama para santrinya beberapa tahun yang silam.

Mengumpulkan Air Kumur

Pada awalnya, dilakukan pengumpulan terhadap sejumlah air kumurnya para santri (300 orang) di Pondok Pesantren setempat pada pagi hari/subuh. Hasil pengamatan laboratorium terbukti adanya kehidupan bakteri relatif banyak. Agar bakteri tetap hidup dicoba diberi pakan berupa blenderan $\frac{1}{2}$ kg pepaya masak ditambah $\frac{1}{2}$ kg molase dan $\frac{1}{2}$ kg dedak untuk setiap ember air kumuran tersebut diatas, kemudian ember ditutup dan disimpan ditempat yang gelap selama 1 (satu) minggu. Setelah itu terdapat indikasi adanya kehidupan bakteri ditandai tumbuhnya busa pada permukaan cairan. Kemudian bakteri diperbanyak kedalam drum-drum disimpan tertutup terlindung dari sinar matahari. Pakan tambahan diberikan sesuai tujuan bahan pembuaan pupuk apa; sebagai contoh diberikan air seni/kencing kelinci untuk

pupuk daun. Perbanyakkan tersebut kemudian menghasilkan “Bakteri Biang” sebagai bahan pokok Mikro Organik Permentasi Alam “MFA”.

Bahan pokok MFA tersebut kini dikembangkan menjadi suatu produk bermerek “BIO ONE” Bio Nutrient Organik akrab lingkungan dalam kemasan 1 liter dan 5 liter.

Bio One adalah pupuk organik hasil proses fermentasi bahan organik dengan bakteri *Bacillus sp.* Dan *Lactobacillus sp* menjadi nutrien yang siap diserap akar. Mengandung jasad renik tanah yang bermanfaat untuk mengembalikan keseimbangan ekologi dan kesuburan alamiah tanah, memberi perlindungan hayati terhadap akar tanaman, mengandung enzim yang mencegah serangan hama dan penyakit. Bio One bukan pestisida atau bahan kimia: aman dipakai, tidak menimbulkan efek samping yang dapat merugikan kesehatan atau kerusakan tanaman atau kerusakan lingkungan namun justru dapat meremajakan kesuburan tanah dan menstabilkan pH.

Penggunaan

Dapat dicor langsung disekitar perakaran tanaman atau disemprotkan

melalui daun, batang dan tanah. Dosis pemakaiannya :

- ◆ 30 – 50 liter Bio One per hektar per aplikasi
- ◆ Larutkan 2 liter Bio One kedalam 1 drum isi 200 liter air untuk 1000 tanaman sayuran dengan luas lahan 400 m² (1 patok)
- ◆ 100 – 200 ml per tanaman, tergantung dari jenis tanaman, umur tanaman, kelembaban tanah dan jumlah populasi tanaman
- ◆ Frekwensi 7 – 10 hari sekali 4 – 5 kali dalam semusim tanam.

Pada saat musim kemarau pengenceran dapat ditambah, disesuaikan kebutuhan air pada saat penyiraman. Penggunaan tidak dianjurkan dicampur dengan pestisida. Pembuatan pupuk kompos (kotoran sapi, kambing, ayam dll selain plastik), dengan menyiramkan campuran 5 cc Bio One + 1 liter air + 1 sendok gula) di permukaannya setelah 20 cm hingga basah, secara berlapis dan lapisan teratas ditutup plastik selama 1 minggu, kemudian dibuka untuk dibalik dan ditutup lagi selama 1 minggu. Setelah itu pupuk kompos siap digunakan di lapang. (Santoso)

EM FPE MINUMAN KESEHATAN TERNAK

Teknologi fermentasi sudah diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1965, namun penerapan dikalangan masyarakat tani belum nampak diapresiasi secara meluas, sementara itu Indonesia dikenal banyak memiliki potensi plasma nutfah. Termasuk berbagai jenis tanaman obat-obatan dengan kandungan anti oksidan yang masih dapat dikembangkan pemanfaatannya, terutama bagi upaya meningkatkan mutu produksi tanaman, atau peternakan.

Dari latar belakang pemikiran itulah EM FPE (*Effective Micro Organisme Fermented Plant Extract*) diformulasikan sebagai fermentasi lanjut dan purna dari teknologi EM4 yang dicampur dengan penambahan tanaman rempah dan obat-obatan yang mengandung zat gizi dan anti oksidan dengan kultur campuran dari hasil seleksi isolasi bakteri. Tujuannya untuk kesehatan, pertumbuhan serta produktivitas ternak dan ikan. Campuran tersebut dijadikan minuman ternak.

Bahan

Bahan rempah terdiri dari kunyit, jahe, kencur kunci, lengkuas, temu lawak, temu ireng, daun kemangi, bengkoang, belimbing waluh, kacang

hijau, bawang merah, dan bawang putih. Cara membuat : Seluruh rempah tersebut dipotong-potong lalu dimasukkan kedalam mesin slep: bahan digiling, diperas dan diambil sarinya. Kemudian sari rempah dicampur dengan tetes tebu (malose) dan EM4 selaku bahan dasarnya. Selanjutnya campuran difermentasikan dengan tutup selama 21 hari.

Bahan jadi fermentasi ini setiap kali proses pembuatannya rata-rata menghasilkan sebanyak 5 jirigen @ 30 liter berupa cairan dengan indikasi bau khas segar tidak menyengat. Bahan jadi ini kemudian dikemas ke dalam botol-botol ukuran ½ liter dengan label EM FPE.

Penerapan EM FPE pada ternak (unggas dan ikan, kambing, domba dan sapi) dengan melarutkan (1 – 3) cc EM FPE dan (3-5) cc molases ke dalam 1 liter air minum dengan cara:

1. dicampurkan pada pakan
2. dicampurkan pada minuman, dan atau
3. disemprotkan pada kandang dan saluran pembuangan kotoran

Hasil

Minuman kesehatan FPE (*Fermented Plant Extract*) diformulasikan melalui serangkaian

penelitian dan uji coba aplikasi pada ternak dengan hasil akhirnya dikemas berlabel EM FPE. Kini jangkauan pasarnya telah meluas keluar dari Kabupaten Nganjuk, antara lain Blitar, Magetan, Lamongan, Purwokerto, Bali dan Bekasi. Untuk Nganjuk sendiri mengakses 500 botol/bulan, sedangkan pengiriman ke luar kabupaten rata-rata 2 box @ 24 biji (kemasan ½ liter) untuk setiap agennya. Beberapa catatan dan

informasi pengguna produk ramuan ini terhadap efek/manfaat bagi usaha peternakannya antara lain :

- ◆ Nafsu makan meningkat
- ◆ Kesehatan ternak/ikan lebih baik, tahan serangan penyakit dan tidak stres (kondisi ternak lebih tenang)
- ◆ Polusi lingkungan (bau tidak sedap) berkurang
- ◆ Pemakaian obat-obatan (antibiotik) berkurang. (Santoso)

LAHAN KELAPA SAWIT UNTUK MEMPRODUKSI DAGING

Dalam era pembangunan pertanian, pengembangan wilayah dan peningkatan kemampuan lahan merupakan hal esensial yang harus selalu dikembangkan, disamping perluasan areal pertanaman. Hal yang terakhir akan berakibat semakin tidak cukupnya wilayah luasan apabila masing-masing sub sektor sendiri-sendiri dan secara terpisah akan memberikan (tanaman pangan, perkebunan, peternakan) efek yang kurang baik dengan adanya limbah produksi apabila tidak disertai dengan pengolahan terhadap limbah yang dihasilkan sebagai hasil ikutan produksi.

Semakin berkembangnya teknologi produksi, hal ini perlu ditunjang dengan

peningkatan teknologi limbah dan aplikasi sistem keseimbangan yang bersiklus daur ulang sebagai sistem yang ramah lingkungan atau setidaknya harus dilakukan “konsevasi” diantara proses produksi masing-masing sub sektor.



Kelapa Sawit

Teknologi Produksi dan Pengolahan

1. Perkebunan Kelapa Sawit

Indonesia mempunyai potensi sebagai produsen kelapa sawit dan perkebunan komoditas ini terus berkembang. Luasan kebunnya sudah mencapai 4,1 juta hektar dan 50% nya sudah berproduksi: kepemilikan swasta seluas 50%, perorangan 32% dan PTPN 18%. Dari luasan produksi tersebut dapat dibayangkan berapa banyak limbah yang dihasilkan sebagai hasil ikutan produksi?

Apabila kita telaah lebih rinci dari bahan pertanaman kelapa sawit tersebut diatas, produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

- Jumlah tanaman = 120 - 130 pohon/ha
- Jumlah pelepah = 22 buah/pohon/tahun
- Bobot pelepah terkupas = 2,2 Kg/pelepah

Sedangkan olahannya dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel I. Biomasa tanaman dan olahan kelapa sawit setiap hektar *)

Biomasa	Segar (Kg)	Bahan Kering (%)	Bahan Kering (Kg)
Daun tanpa lidi	1.430	46,18	658
Pelepah	9.292	26,87	1.640
Tandan kosong	3.680	92,1	3.386
Serat perasan	2.880	93,11	2.681
Lumpur sawit, solid	4.704	24,07	1.132
Bungkil kelapa sawit	560	91,83	514
Total biomasa			10.011

Keterangan

*) 1 Ha = 130 pokok pohon

- 1 pohon dapat menyediakan pelepah sejumlah 22 per tahun
- 1 pelapah, bobot 2,2 kg (hanya 1/3 bagian yang dimanfaatkan)
- Bobot daun per pelapah 0,5 kg
- Tandan kosong 23% dan TBS
- Produksi minyak sawit 4 ton per tahun (Liwang 2003)

- 1000 kg TBS menghasilkan 250 kg minyak sawit, 294kg lumpur sawit, 180 kg serat perasan dan 35 kg bungkil kelapa sawit (Jalaludin et al, 1991)

• Peningkatan Produktivitas

Peningkatan produktivitas kelapa sawit dapat dilakukan dengan

upaya pengefisienan dalam pemanfaatan lahan pertanian (dapat ditingkatkan dari 120 – 130 pohon/ha menjadi 140 pohon/ha), tenaga kerja (bobot kerja) dan penekanan biaya pemupukan/perawatan.

• Permasalahan

Selain peningkatan produktifitas, hal-hal yang muncul sebagai permasalahan adalah

- Terjadi peningkatan biaya tenaga kerja (pada kondisi pengangkutan yang tidak lancar sebagai akibat keterbatasan tenaga kerja).
- Volume limbah produksi yang tidak sedikit.

2. Peternakan Sapi Potong

Sapi potong berperan penting sebagai pabrik pengubah hijauan rumput menjadi daging berkualitas yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan penambahan penduduk di Indonesia, kebutuhan terhadap daging cenderung terus meningkat (meski rata-rata konsumsi daging di Indonesia sekarang masih dapat dikatakan sangat rendah, yakni kurang dari 2 kg/kapita/tahun). Sayangnya

produksi ternak sapi potong di sentra produksi menurun drastis mencapai 50 %. Hal ini mengakibatkan semakin meningkatnya pengadaan import. Termasuk edible part (jeroan) dan sapi hidup dalam kuantitas yang sebanding, mencapai setara dengan 420.000 ekor (import sapi hidup tahun 2002)

Penurunan populasi ternak sapi di sentra produksi disebabkan oleh banyak faktor pembatas seperti :

- Kondisi dan kuantitas pakan yang rendah.
- Teknis pemeliharaan ternak yang masih sangat terbatas.
- Sistem agribisnis yang belum seragam.
- Biaya produksi yang tidak sebanding dengan bunga bank dan pinjaman.
- Skala usaha
- Limbah produksi yang belum didayagunakan secara maksimal.

3. Sistem Usaha dan Pengelolaan Komoditas

Ada berbagai usaha dan pengelolaan yang aplikatif yaitu :

1. Intensifikasi

Dalam sistem ini , komoditas dikelola secara intensif dan diupayakan untuk memproduksi

setinggi-tingginya tanpa memperluas lahan yang diperlukan, tetapi memaksimalkan penggunaan lahan dengan menerapkan daya tampung/kepadatan semaksimal mungkin (jumlah, produksi)

Pada kondisi ini, komoditas dikelola spesifik dengan teknologi tinggi menurut kebutuhannya.

2. Diversifikasi

Sistem ini mengelola beberapa jenis komoditas secara bersamaan dalam satu lahan usaha yang terbatas, masing-masing komoditas saling berkaitan, satu sama lain secara kesinambungan

3. Integrasi

Sistem ini lebih spesifik, dua komoditas atau lebih dikelola secara bersamaan dan saling berkaitan satu sama lain menurut fungsinya, meski secara khusus masing-masing komoditas mempunyai produk yang khas dan jelas.

Pada tulisan ini diketengahkan sistem yang ke 3, yaitu sistem integrasi dengan komoditas kelapa sawit dan sapi potong.

Sebagaimana sudah dijelaskan dimuka tentang komoditas kelapa sawit, untuk komoditas sapi potong, jenis Sapi Bali merupakan jenis yang tepat untuk dikembangkan.

• Mengapa Sapi Bali ?

Berbagai alasan terhadap penulisan sapi Bali pada sistem integrasi kelapa sawit adalah sebagai berikut :

- Berfungsi sebagai pengganti tenaga kerja (dapat meringankan fungsi tenaga manusia ; dengan begitu dapat menurunkan tenaga kerja).
- Mempunyai kemampuan tinggi dalam beradaptasi di lingkungan iklim tropis.
- Sebagai penghasil daging dengan harga jual tinggi
- Potensial dalam menghasilkan bahan utama pupuk kompos
- Produktif
- Memiliki kualitas karkas yang baik
- Berkemampuan tinggi dalam mengubah bahan kasar dan hijauan menjadi daging yang tinggi.

Peranan sapi Bali dalam sistem integrasi dengan kelapa sawit :

- Pemanenan tandan buah segar kelapa sawit menjadi lebih efisien. Dapat (meningkatkan luasan panen dari 10 ha menjadi 15 ha/orang)
- Investasi lebih murah dibandingkan dengan kendaraan bermotor

- Perawatan lebih sederhana dan lebih murah
- Limbah kelapa sawit (pelepeh dan daun) melalui proses pengolahan fisik, kimia dan biologis, misalnya amoniasi;

dapat dimanfaatkan sebagai pakan.

Sebagai parameter teknis dan ekonomis dari penggunaan Sapi Bali pada sistem integrasi dengan kelapa sawit, dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel. 2 Parameter teknis dan ekonomi digunakan dalam perhitungan

Parameter	Nilai
Skala usaha (ekor)	3
Jangka waktu produksi (tahun)	7
Tingkat kelahiran (%)	60
Tingkat kematian (%)	3
Upah tenaga kerja (Rp/jam)	1670
Harga induk (Rp/ekor)	2.450.000
Harga jual induk (Rp/ekor)	3.500.000
Harga jual jantan (Rp/ekor)	4.000.000
Harga jual Sapi bakalan (Rp/ekor)	2.500.000
Harga jual anak sapihan (Rp/ekor)	1.500.000
Harga jual kotoran ternak (Rp/karung)	2000

Keterangan : Biaya pakan sepenuhnya berasal dari “limbah” perkebunan sawit

Kesimpulan dan Saran

Dari integrasi Sapi Bali dengan kelapa sawit beberapa keuntungan/ manfaat yang diperoleh adalah :

- Efisiensi pemanenan tandan buah segar (efisiensi tenaga kerja)
- Memberi peluang untuk mengembangkan dan pemasaran Sapi potong.

Disarankan, perlu peningkatan lebih lanjut pada :

- Pengelolaan pupuk organik
- Antisipasi pemasaran melalui koperasi
- Penyediaan kredit jangka panjang dengan suku bunga komoditi.

Disarikan dari Pengkajian Pengembangan Usaha Sistem Irigasi Kelapa Sawit-Sapi)



EKSTENSIA menerima :

Tulisan yang bersitat aktual tidak berkepanjangan, padat, mudah dibaca dan dimengerti, dengan gaya yang enak dibaca. Jumlah 350 kata atau kelipatan bulatnya diketik rapih dan ditandatangani oleh penulis, dikirim ke Ekstensia dengan dilengkapi identitas/photo copy KTP/ Karpeg Penulis.

Untuk rubrik-rubrik :

WAHANA

Tulisan dan gambar/fotonya, berupa feature/berita kisah dan profil dari suatu kelembagaan penyuluhan pertanian, bertujuan untuk membangun motivasi berpartisipasi dalam pembangunan pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SOSOK

Tulisan dan gambar/fotonya berupa feature dari sosok Penyuluh Pertanian untuk kontak tani Nelayan/petani maju yang melaporkan keberhasilan (succes story), yang bertujuan untuk sebagai teladan bagi orang lain yang seprofesi.

WAWASAN

Tulisan atau informasi bebas dengan gambar/fotonya, berisi ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, atau pengalaman lapangan dibidang pertanian, atau tulisan dari seorang ahli (peneliti, praktisi) dibidang pertanian, yang bertujuan untuk menambah wawasan.

OPINI

Berupa tulisan pembaca yang merupakan tulisan asli, kondisi faktual dilapangan yang mengemukakan masalah, kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan pertanian khususnya penyuluhan pertanian, disertai dengan pemikiran tentang pemecahan masalahnya. (maksimum 350 kata).

SWADAYA

Tulisan dengan gambar/datanya dari kegiatan Swadaya KTNA/Petani-Nelayan bertujuan untuk memotivasi/menggugah keswadayaan Petani-Nelayan yang lain.

GEMA

Tulisan atau berita/informasi bebas, dengan gambar/fotonya, berisi segala sesuatu berkaitan dengan organisasi profesi, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi para pakar dan Penyuluh Pertanian dalam pengembangan organisasi dan profesinya, baik di pusat maupun cabang-cabangnya di daerah.

Ekstensia mempunyai wewenang yang mandiri untuk menentukan tulisan yang akan dimuat, sedangkan tulisan yang tidak dimuat akan dikembalikan apabila disertai dengan perangko yang cukup.

